



## **PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**



### **PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 180/06/HUK-E/2022

NOMOR : 170/03/NKB-DPRD/2022

**TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. ERMAN SAFAR, SH**  
Jabatan : Walikota Bukittinggi  
Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Bukittinggi.  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi.
2. a. Nama : **BENY YUSRIAL, S.IP**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi  
  
b. Nama : **NUR HASRA, B.Sc**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi  
  
c. Nama : **RUSDY NURMAN, SH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi.  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi  
Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Belanja serta Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

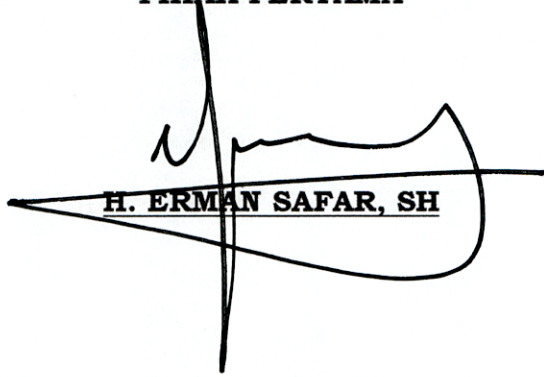
Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
PIHAK PERTAMA



H. ERMAN SAFAR, SH

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
PIHAK KEDUA



BENY YUSRIAL, S.IP  
KETUA



NUR HASRA, B.Sc  
WAKIL KETUA



RUSDY NURMAN, SH  
WAKIL KETUA

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS.....	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS.....	3
<b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b> .....	6
2.1. Pendapatan Daerah .....	6
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah. ....	7
<b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....	9
<b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN</b> .....	232
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....	232
4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	326
<b>BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH</b> .....	327
5.1. Penerimaan Pembiayaan.....	328
5.2. Pengeluaran Pembiayaan.....	329
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	330

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disusun dengan tahapan:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
3. Menyusun capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Sebagai bagian dari dokumen penganggaran Tahun 2023, Rancangan PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah, yang tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Bukittinggi ke depan. Ketersediaan dana yang dirumuskan dalam APBD, nantinya akan digunakan untuk mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan fungsi pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang selama ini terselenggara serta pemulihan ekonomi nasional akibat dari pandemi Covid-19.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; (3) tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (4) transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; (5) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan (6) tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Dengan demikian, penyusunan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Bukittinggi sebagai salah satu dokumen yang diperlukan dalam penyusunan APBD akan memiliki kedudukan cukup penting, karena merupakan rancangan program dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Penyusunan PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bukittinggi Tahun 2023. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, rancangan KUA disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan PPAS kepada DPRD. Selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA dan PPAS dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 akan lebih efektif.

## **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Tujuan penyusunan PPAS adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD serta rancangan Perda APBD Tahun 2023
2. Sebagai dasar untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2023
3. Pedoman bagi TAPD dalam menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan PPAS;
4. Acuan bagi seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) di daerah terkait kebijakan publik;
5. Upaya menciptakan kepastian kebijakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

## **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

Dasar hukum penyusunan PPAS adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintah daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.



## **BAB II**

### **RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

Perencanaan sumber penerimaan daerah untuk pelaksanaan pembangunan di daerah diatur dengan beberapa aturan berkenaan dengan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dimana pendapatan daerah dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

#### **2.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Pulihnya ekonomi nasional terutama kinerja sektor pariwisata berdampak signifikan terhadap Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi terutama dari sektor pariwisata seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Retribusi Pasar dan lain-lain yang tentunya juga mengubah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2023 sehingga Rencana Pendapatan Daerah Pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga mengalami perubahan yang cukup berarti.

Rencana Pendapatan Daerah pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp664.170.126.164,00 yang terdiri dari;

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp159.948.694.941,00  
Bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp51.110.644.633,00, Retribusi Daerah sebesar Rp51.239.239.000,00, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.307.425.308,00 dan lain lain PAD yang Sah sebesar Rp49.291.386.000,00
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp504.221.431.223,00  
Bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp472.045.912.544,00 dan Pendapatan Transfer Antar Pemerintah Daerah sebesar Rp32.175.518.679,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,-

## 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah; dan
7. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir..

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp43.000.000.000,00 yang sepenuhnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). SiLPA ini harus diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan

Rincian target penerimaan daerah berdasarkan masing-masing komponen pendapatan dan penerimaan pembiayaan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bukittinggi**  
**Tahun Anggaran 2023**

<b>Rek</b>	<b>Uraian</b>	<b>Proyeksi/ Target pada Th 2023</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>664.170.126.164,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>159.948.694.941,00</b>
1.1.1.	Pajak Daerah	51.110.644.633,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	51.239.239.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.307.425.308,00
1.1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	49.291.386.000,00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>504.221.431.223,00</b>
1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	472.045.912.544,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.175.518.679,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Hibah	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0,00
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43.000.000.000,00</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>43.000.000.000,00</b>
6.1.1	SiLPA Tahun Sebelumnya	43.000.000.000,00
6.1.2	Pencairan dana cadangan	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN DAERAH</b>		<b>707.170.126.164</b>

### **BAB III**

## **PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim).
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan

5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2021- 2026 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai hasil akhir pelaksanaan Visi RPJMD 2021-2026, namun demikian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 juga adaptif dan responsif terhadap dampak pandemi Covid 19 sekaligus juga mendukung pencapaian Tema RKP dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan difokuskan pada peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah, yakni kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Ketiga sektor strategis ini juga tergambar dalam program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2023 tetap dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Misi sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.

3. Prioritas pembangunan meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Prioritas pembangunan meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Prioritas pembangunan meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan.
6. Prioritas pembangunan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Prioritas pembangunan mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat maka tema RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah: “Keberlanjutan Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pemulihan Pasca Pandemi”. Selanjutnya mengacu kepada prioritas nasional dan provinsi, serta untuk pengembangan ekonomi nasional dan daerah sebagai dampak pandemi covid semenjak tahun 2020, maka prioritas pembangunan Kota Bukittinggi untuk Tahun 2023 secara lebih kongkrit diuraikan sebagai berikut:

### 1. Prioritas Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan berbasis masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan masyarakat terhadap dampak ekonomi dari pandemi yang terjadi. Kegiatan prioritas untuk mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan tersebut adalah :

- a. Peningkatan akses pelaku usaha kecil terhadap permodalan dengan penyediaan akses permodalan tanpa bunga melalui inovasi daerah berupa “Tabungan Ustman” dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- b. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendataan dan penataan pedagang pada kawasan strategis daerah melalui inovasi daerah berupa aplikasi “Bukittinggi Hebat”.
- c. Penyediaan bantuan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat miskin.
- d. Penyediaan infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
- e. Revitalisasi pasar.
- f. Peningkatan kemampuan pemasaran digital bagi usaha mikro.
- g. Meningkatkan kewirausahaan masyarakat.
- h. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.

## 2. Prioritas Pengembangan Sektor Pendidikan

Prioritas sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan nilai-nilai agama, adat, dan budaya yang telah mengharumkan Bukittinggi khususnya dan Masyarakat Minang umumnya dengan tokoh-tokoh besar di tingkat nasional bahkan internasional. Prioritas ini untuk tahun 2023 dilaksanakan melalui program prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kecerdasan sosial peserta didik melalui penerapan pendidikan berkarakter berbasis agama dan kearifan lokal.
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan masyarakat melalui bantuan iuran pendidikan.
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan
- d. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan.
- e. Mendorong tumbuh kembang perguruan tinggi.
- f. Peningkatan penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi.
- g. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan.

## 3. Prioritas Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat didukung infrastruktur ramah lingkungan, berkualitas dan berkelanjutan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa program prioritasnya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- b. Penyediaan pembiayaan iuran kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.
- d. Pelayanan kesehatan dan program kesehatan yang adil, prima dan merata.
- e. Peningkatan infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan.
- f. Mewujudkan konsep kota ramah lingkungan.
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan berbasis kelurahan.
- h. Peningkatan koordinasi penyediaan tempat pengolahan akhir sampah dengan daerah tetangga.

## 4. Prioritas Pengembangan Kepariwisata, Seni Budaya dan Olahraga

Prioritas ini ditujukan untuk menjadikan Bukittinggi sebagai daerah kunjungan wisata utama dengan menjadikan seluruh sektor pembangunan tumbuh secara beririsan dengan kepariwisataan. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga bertujuan untuk peningkatan kunjungan wisatawan, rata-rata lama tinggal, dan spending of money wisatawan di Bukittinggi. Beberapa program prioritas tahun 2023 terkait hal ini antara lain:

- a. Pengembangan wisata taman kota dan ruang terbuka publik, berupa:
    - 1) Revitalisasi Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan melalui pengembangan *night zoo*.
    - 2) Meningkatkan daya tarik objek wisata, taman kota dan kawasan ekonomi malam hari melalui penyediaan atraksi dan fasilitas wisata malam hari.
  - b. Revitalisasi kawasan wisata alam dan keluarga, dengan penguatan destinasi wisata eksisting Ngarai Sianok, Lobang Jepang, dan Benteng Fort De Kock.
  - c. Pembangunan kawasan objek wisata baru di Koto Barangai.
  - d. Penyediaan sarana dan prasarana atraksi seni dan budaya.
  - e. Peningkatan promosi wisata dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - f. Pengembangan wisata sentra produksi lokal melalui konsep *one village one product* berupa sentra pembuatan sanjai, sentra pembuatan kopi Bukit Apit.
  - g. Pengembangan industri kreatif daerah.
  - h. Pengembangan wisata kuliner dan fasilitasi produk halal usaha mikro.
  - i. Wisata acara/ even, berupa perancangan kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan daya tarik wisatawan, baik even seni budaya maupun olahraga.
  - j. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat pada kawasan permukiman.
5. Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, diupayakan berupa:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada mall pelayanan publik.
  - b. Pengaplikasian konsep *smart city* untuk penyediaan pelayanan berbasis teknologi informasi.
  - c. Pembangunan baru kantor pemerintahan seperti kantor camat, kantor lurah serta perencanaan pembangunan kantor bersama pemerintah daerah.
  - d. Penyelenggaraan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
  - e. Pengelolaan pemerintahan yang beradab dan religious.
  - f. Mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota sangat inovatif.
  - g. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi potensi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
  - h. Pengembangan konsep spasial pada penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.
  - i. Optimalisasi peran kelurahan dalam rangka penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat.



### 6. Prioritas Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Prioritas ini berorientasi untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai luhur sebagai budaya yang berakar dengan filosofi masyarakat Minang, Adat basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dengan memberdayakan potensi kelembagaan yang ada di tengah tatanan kehidupan masyarakat, berupa :

- a. Peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan sekolah keluarga.
- b. Mewujudkan kota ramah disabilitas melalui penyediaan infrastruktur kota ramah disabilitas.
- c. Penerapan pengarusutamaan gender dan peningkatan keberdayaan perempuan melalui optimalisasi program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- d. Pencegahan dan peningkatan pengawasan terhadap kekerasan dalam keluarga melalui optimalisasi peran kelurahan.
- e. Peningkatan kegiatan masyarakat melalui program berbasis masjid.
- f. Meningkatkan kenyamanan kota melalui penegakan Perda secara persuasif.
- g. Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

### 7. Prioritas Pengembangan Sektor Pertanian

Prioritas ini diarahkan untuk mengoptimalkan keterbatasan lahan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing pertanian yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan petani melalui :

- a. Meningkatkan ketahanan pangan.
- b. Pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan.
- c. Mendorong terciptanya agro industri dan kawasan agrowisata perkotaan.
- d. Fasilitasi budidaya tanaman hias sebagai produk unggulan daerah.
- e. Operasional rumah potong hewan modern.
- f. Mendorong terciptanya wirausaha baru bidang perikanan dan peternakan.
- g. Perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan petani.

Program prioritas yang disusun pada setiap prioritas pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2023 merupakan terjemahan dari visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan Visi dan Misi pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase penurunan kasus hubungan industrial		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
			"Ketersediaan energi dan protein per kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Ketersediaan energi per kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Ketersediaan pangan utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Ketersediaan protein per kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Koefisien Variation (CV) Harga Beras Kota Bukittinggi		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Konsumsi Energi per Kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Konsumsi Protein per Kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Margin Tataniaga Pangan Utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Ketersediaan energi dan protein perkapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Ketersediaan pangan utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase data informasi perizinan secara online		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Nilai produksi perikanan budidaya		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
			Persentase pengembangan produk peternakan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Persentase pengembangan produk peternakan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Persentase penurunan kasus Penyakit hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
			Persentase penurunan kasus penyakit hewan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
			Persentase peningkatan kelas kelompok tani		
				Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP		
				Badan Keuangan	
<b>2</b>	<b>Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan</b>				
<b>3</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Persentase Sekolah Akreditasi A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SNP		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan Universal Coverage (UHC)		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman		
				Dinas Kesehatan	
			Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS		
				Dinas Kesehatan	
			Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif		
				Dinas Kesehatan	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga		
				Dinas Kesehatan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Meningkatnya Sportourism		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
			Meningkatnya Sportourism dan Olahraga Prestasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Presentase Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			"Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			"Meningkatnya Perlindungan Kearsipan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Presentase Pengembangan Obyek Wisata		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
			Jumlah Pesar Ekraf		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Jumlah Pesar Ekraf		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Sekretariat Daerah	
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan		
				Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
<b>4</b>	<b>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Warisan Budaya yang Dibina , Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan di Kelola		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>5</b>	<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			NILAI SAKIP SKPD		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase PSU yang layak		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Kebakaran	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			0Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	
			persentase penurunan kejadian kebakaran		
				Dinas Kebakaran	
			persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	
			Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate)		
				Dinas Kebakaran	
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks Domain Layanan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Indeks Domain Layanan e-government		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>6</b>	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
<b>7</b>	<b>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Sakip		
				Satuan Polisi Pamong Praja	
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
			Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL			

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
			Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
			Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder		
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
			Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP		
				Badan Keuangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Pengelolaan Keuangan sesuai aturan		
				Badan Keuangan	
			Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu		
				Badan Keuangan	
			Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu		
				Badan Keuangan	
			Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran		
				Badan Keuangan	
			Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP		
				Badan Keuangan	
			Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu		
				Badan Keuangan	
			Persentase penyerapan belanja daerah		



**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Badan Keuangan	
				Persentase penyerapan dana transfer	
				Badan Keuangan	
				Sistem terintegrasi	
				Badan Keuangan	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
				Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD	
				Badan Keuangan	
				Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD	
				Badan Keuangan	
				Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD	
				Badan Keuangan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
				Jumlah jenis pajak memakai sistem online	
				Badan Keuangan	
				Jumlah penambahan objek pajak baru	
				Badan Keuangan	
				Persentase Pajak Tertagih	
				Badan Keuangan	
				Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	
				Badan Keuangan	
				Persentase peningkatan pajak daerah	
				Badan Keuangan	
				Persentase peningkatan retribusi daerah	
				Badan Keuangan	
				Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	
				Badan Keuangan	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Nilai SAKIP SKPD	
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
				Indeks NSPK	
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Indeks Profesionalitas Aparatur	
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

**Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
			Indeks Profesionalitas Aparatur		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			nilai saki		
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel 3.2

## Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
90	<b>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	970.754.700
			nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	428.478.940
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.532.742.702
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
			Angka Putus Sekolah		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	198.815.800
			Persentase Satuan Pendidikan Akreditasi A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.204.961.104
			Persentase Sekolah Akreditasi A		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.891.402.481
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
			Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.003.800
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
			Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SNP		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Kesehatan	57.146.886.399
			Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan		
				Dinas Kesehatan	40.567.103.271
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif		
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
			Cakupan kunjungan Antenatal		
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
			Cakupan kunjungan balita		
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
			Cakupan kunjungan neonatal		
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
			Cakupan Universal Coverage (UHC)		

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Kesehatan	28.997.268.082
				Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase kasus DBD mendapat layanan kesehatan sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase kasus HIV mendapat layanan kesehatan & pengobatan	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase Ketersediaan data yang berasal dari sistem aplikasi	
				Dinas Kesehatan	44.580.600
				Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan	
				Dinas Kesehatan	512.325.700
				Persentase masyarakat berisiko terdeteksi Diabetes Mellitus	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase masyarakat berisiko terdeteksi Hipertensi	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	664.067.710
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	19.850.618.474
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	28.997.268.082
				Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	
				Dinas Kesehatan	8.085.680.000
				Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
				Dinas Kesehatan	8.509.169.698
				Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	16.171.360.000
				Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	
				Dinas Kesehatan	28.997.268.082

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	512.325.700
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	235.802.010
			Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja		
				Dinas Kesehatan	242.932.010
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
			Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan		
				Dinas Kesehatan	218.259.300
			Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman		
				Dinas Kesehatan	218.259.300
			Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan		
				Dinas Kesehatan	218.259.300
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
			Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS		
				Dinas Kesehatan	221.010.800
			Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif		
				Dinas Kesehatan	221.010.800
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai		
				Dinas Kesehatan	136.906.700
			Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Dinas Kesehatan	90.576.400
			Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga		
				Dinas Kesehatan	221.010.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.095.469.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.567.539.532
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.814.101.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			"Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	907.050.500
			Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.766.592
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
			"Meningkatnya koleksi perpustakaan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.851.000
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
			"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	370.748.650
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
			"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.209.100
			"Meningkatnya Perlindungan Kearsipan "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.837.000
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
			"Persentase Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip "		
				Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.585.600
<b>92</b>	<b>Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK BAsandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah</b>				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Gaji dan Tunjangan		
				Satuan Polisi Pamong Praja	6.417.795.081
			Nilai Sakip		
				Satuan Polisi Pamong Praja	967.921.800
			Sakip		
				Satuan Polisi Pamong Praja	19.590.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
			Persentase gangguan trantibum yang tertangani		
				Satuan Polisi Pamong Praja	18.748.532.060
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
				Dinas Sosial	3.175.209.872
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
			Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial		
				Dinas Sosial	1.319.779.500
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
			Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana		
				Dinas Sosial	2.390.633.342

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
			Persentase Penanganan Bencana		
				Dinas Sosial	254.622.000
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
			Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional		
				Dinas Sosial	385.354.366
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	6.829.176.355
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
			Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.017.293.800
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
			Rasio Kekerasan terhadap Perempuan		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	60.326.670
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
			Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.481.251.978
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
			Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	14.867.800
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
			Pokja KLA aktif		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	519.244.042
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
			Persentase anak yang membutuhkan Perlindungan khusus yang terlayani		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	223.514.800
			Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak )		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	88.191.800
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	160.653.900
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
			Contraceptive Prevalence Rate (CPR)		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	159.505.100
			Contraceptive Prevalence Rate (CPR).		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.027.693.680
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
			Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		
				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.110.482.460
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
			Jumlah Warisan Budaya yang Dibina, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.408.500
			Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.602.700
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
			Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	631.625.000
			Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	631.625.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.594.000
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan di Kelola		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.660.100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
			Jumlah Museum yang Di kelola dan Dimanfaatkan		
				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	685.682.208
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.097.465.024
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
			JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	257.772.400
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
			JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.822.050.323
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
			JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	545.976.300
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	631.349.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
			JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI		
				Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.986.743.770
<b>99</b>	<b>Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital</b>				
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.720.800
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Persentase penurunan kasus hubungan industrial		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.049.100
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	118.671.780
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Persentase Koperasi Sehat		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	29.705.900
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Persentase pertumbuhan koperasi		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	32.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.528.289.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
			Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.299.999.800
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
			Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.163.047.094
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.205.841.356
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
			Nilai realisasi investasi hijau		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	145.533.900

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase unsur pelayanan berkategori baik		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.087.805.390
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
			Persentase data informasi perizinan secara online		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	19.406.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	245.349.112
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
			persentase tertib niaga		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	14.896.900
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
			Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	30.630.393.990
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
			Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	177.464.740
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
			Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk ekspor		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	384.736.200
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
			Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	190.013.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
			Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.381.811.170
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
			Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.503.313.080
			Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.503.313.080
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
			Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.010.504
<b>101</b>	<b>Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan</b>				

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.677.882.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	9.136.205.111
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	1.088.571.520
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
			Konsumsi energi perkapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	15.692.400
			Konsumsi energi per kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	419.112.200
			Konsumsi Energi per Kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400
			Konsumsi protein perjkapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	15.692.400
			Konsumsi protein per kalpita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	419.112.200
			Konsumsi Protein per Kapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400
			Margin tataniaga pangan utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	434.804.600
			Margin Tataniaga Pangan Utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
			Ketersediaan energi dan protein perkapita		
				Dinas Pertanian dan Pangan	23.120.000
			Ketersediaan pangan pangan utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	23.120.000
			Ketersediaan pangan utama		
				Dinas Pertanian dan Pangan	23.120.000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
			Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi diatas ambang batas		
				Dinas Pertanian dan Pangan	18.590.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
			Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	483.053.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
			Meningkatnya Sportourism		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.264.760.028
			Meningkatnya Sportourism dan Olahraga Prestasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.768.244.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
			Presentase Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	500.796.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	15.281.700
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
			Nilai produksi perikanan budidaya		
				Dinas Pertanian dan Pangan	734.588.110
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
			Persentase pengembangan produk perikanan		
				Dinas Pertanian dan Pangan	238.851.880
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
			Presentase Pengembangan Obyek Wisata		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	27.503.286.982
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
			Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.635.298.650
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
			Jumlah Pesar Ekraf		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.073.027.866
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	4.528.300
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Pertanian dan Pangan	89.773.500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
			0Nilai produksi Pertanian (padi)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	17.814.300
			Nilai produksi pertanian (padi)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	4.003.893.608
			Nilai produksi pertanian (tanaman hias)		
				Dinas Pertanian dan Pangan	3.978.893.608
			Nilai produksi pertanian (Tanaman hias)		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pertanian dan Pangan	25.000.000
				Nilai produksi Pertanian (Tanaman hias)	
				Dinas Pertanian dan Pangan	17.814.300
				Persentase maningkatnya pengolahan hasil pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	25.000.000
				persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804
				Persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	2.007.261.104
				Persentase pengembangan produk pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	4.021.707.908
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Indeks ketersediaan prasarana pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.379.085.200
				Laju konversei lahan pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	17.650.000
				Laju konversi lahan pertanian	
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.361.435.200
				Persentase prasarana pertanian yang fungsional	
				Dinas Pertanian dan Pangan	8.379.085.200
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
				Persentase pengembangan produk peternakan	
				Dinas Pertanian dan Pangan	59.999.804
				Persentase pengembangan produk peternakan	
				Dinas Pertanian dan Pangan	467.946.884
				Persentase penurunan kasus hewan	
				Dinas Pertanian dan Pangan	240.983.440
				Persentase penurunan kasus Penyakit hewan	
				Dinas Pertanian dan Pangan	59.999.804
				Persentase penurunan kasus penyakit hewan	
				Dinas Pertanian dan Pangan	226.963.444
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani	
				Dinas Pertanian dan Pangan	516.974.740
<b>102</b>	<b>Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan</b>				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai SAKIP SKPD	
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.267.900
				NILAI SAKIP SKPD	

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.904.372.151
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
			Persentase daerah irigasi yang ber kondisi baik		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.490.556.017
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
			Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.888.600
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.291.400
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
			Persentase pengurangan titik genangan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.688.828.840
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
			Persentase bangunan gedung hijau		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.336.057.650
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
			Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan ber kondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.355.668.609
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
			Persentase bangunan gedung hijau		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.951.750
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
			Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.010.036.791
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			---		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	372.385.200
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			---		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.153.323.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase PSU yang layak		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	11.991.561.373
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.557.978.350
				Dinas Kebakaran	5.564.002.961
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500
			Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930
			Persentase pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500
			Persentase Pembangunan Kembali Semua Prasarana dan Sarana Kelembagaan pada Wilayah Pasca Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930
			Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500
			Persentase Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik dan Masyarakat		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930
			Persentase respon cepat kejadian bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500
			Persentase Respon Cepat Kejadian Bencana		
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
			0Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	19.112.800
			Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	92.104.750
			persentase penurunan kejadian kebakaran		
				Dinas Kebakaran	2.152.001.050
			persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	19.112.800
			Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran		
				Dinas Kebakaran	26.985.250
			Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate)		
				Dinas Kebakaran	2.152.001.050
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.771.900
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.014.000
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.297.800
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.837.940
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
			Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.666.910
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase laporan kepegawaian tepat waktu		
				Dinas Lingkungan Hidup	8.191.373.550
			Persentase penyampaian dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.052.039.789
			Persentase sasaran, program kegiatan renja skpd yang selaras dengan renstra SKPD		
				Dinas Lingkungan Hidup	36.740.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase usaha kegiatan yang diawasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	332.777.600
			---		
				Dinas Lingkungan Hidup	398.086.000
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	234.942.840
			Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu		
				Dinas Lingkungan Hidup	234.942.840
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
			Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.147.279.650
			Persentase penambahan vegetasi di taman kehati		
				Dinas Lingkungan Hidup	2.147.279.650
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
			Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang dikelola		
				Dinas Lingkungan Hidup	16.500.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
			Persentase PPLH tersertifikasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	73.713.300
			Persentase usaha kegiatan yang diawasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	73.713.300



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
			Persentase pengurangan sampah dimasyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup	60.495.200
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH		
				Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850
			Persentase pengurangan sampah di masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850
			Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
			Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	185.425.900
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
			Persentase usaha kegiatan yang diawasi		
				Dinas Lingkungan Hidup	18.998.600
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
			Persentase pengurangan sampah di masyarakat		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474
			Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474
			Persentase timbulan sampah		
				Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			---		
				Dinas Perhubungan	12.974.164.280
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
			Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap		
				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.447.389.520
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	388.941.800
			Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan		
				Dinas Perhubungan	388.941.800
			Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas		
				Dinas Perhubungan	388.941.800
			Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi		
				Dinas Perhubungan	388.941.800
			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perhubungan	388.941.800
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	
				Dinas Perhubungan	388.941.800
				---	
				Dinas Perhubungan	2.911.837.680
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Presentase Pengembangan Obyek Wisata	
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	889.242.300
<b>104</b>	<b>Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas</b>				
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Cakupan Universal Coverage (UHC)	
				Dinas Kesehatan	494.208.740
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar	
				Dinas Kesehatan	494.208.740
				Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan	
				Dinas Kesehatan	494.208.740
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	36.740.000
				---	
				Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.807.787.905
				Nilai SAKIP SKPD	
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	157.499.400
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
				Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	
				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	372.289.000
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.621.265.511
				Tingkat Kepuasan terhadap layanan internal SKPD	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	19.200.000
				Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	146.491.000
				Tingkat Kepuasan Terhadap Peleayanan Internalk Organisasi	
				Dinas Komunikasi dan Informatika	3.223.424.611
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Dinas Komunikasi dan Informatika	1.754.782.410
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
			Indeks Domain Layanan		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.140.612.540
			Indeks Domain Layanan e-government		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.827.703.780
			Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.140.612.540
			Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	2.140.612.540
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	9.494.456.656
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
			Persentase kemudahan berusaha		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	187.612.400
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
			Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan		
				Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	103.858.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
			Persentase Ketersediaan Data Sektoral		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	119.999.600
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
			Aplikasi dan Infrastruktur yang lulus uji BSSN		
				Dinas Komunikasi dan Informatika	95.044.500
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai Sakip SKPD		
				Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.374.873.754
			Nilai SAKIP SKPD		
				Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	41.218.800
				Sekretariat Daerah	19.293.800
			Persentase capaian target penataan organisasi		
				Sekretariat Daerah	375.574.000
			Persentase laporan keuangan yang tepat waktu		
				Sekretariat Daerah	13.638.094.000
			Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana		
				Sekretariat Daerah	397.520.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekretrais Daerah dan Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	9.550.381.238
			Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	3.595.991.130
			Persentase pelayanan kebutuhan sarana dsan prasarana K		
				Sekretariat Daerah	3.133.035.600
			Persentase pelayanan kehumasan dan tamu		
				Sekretariat Daerah	3.897.718.710
			Persentase pemenuhan kebutuhan Sekretariat Daerah		
				Sekretariat Daerah	4.101.551.320
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
				Sekretariat Daerah	1.126.928.100
			Laporan penyelenggaraan pemerintahan		
				Sekretariat Daerah	106.750.000
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan		
				Sekretariat Daerah	1.126.928.100
			Persentase lembaga keagamaan yang aktif		
				Sekretariat Daerah	28.004.595.360
			Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU		
				Sekretariat Daerah	772.282.282
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
			Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan		
				Sekretariat Daerah	635.894.200
			Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan		
				Sekretariat Daerah	160.618.600
			Persentase realisasi belanja modal		
				Sekretariat Daerah	395.008.200
			Persentase SKPD yang selesai mengentry SIRUP		
				Sekretariat Daerah	1.222.404.944
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai evaluasi AKIP SKPD		
				Sekretariat DPRD	22.229.800
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah		
				Sekretariat DPRD	20.098.330.493
			---		
				Sekretariat DPRD	90.500.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
			Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

### Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Sekretariat DPRD	21.891.159.462
			Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		
				Sekretariat DPRD	1.100.417.700
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5.823.625.284
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
			Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	679.082.000
			Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	163.708.300
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
			Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	581.555.600
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP		
				Badan Keuangan	12.530.510.905
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
			Pengelolaan Keuangan sesuai aturan		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase penyerapan belanja daerah		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Persentase penyerapan dana transfer		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
			Sistem terintegrasi		
				Badan Keuangan	25.193.559.966
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
			Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Badan Keuangan	2.460.404.310
			Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD		
				Badan Keuangan	2.460.404.310
			Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD		
				Badan Keuangan	2.460.404.310
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
			Jumlah jenis pajak memakai sistem online		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Jumlah penambahan objek pajak baru		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Persentase Pajak Tertagih		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Persentase peningkatan pajak daerah		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Persentase peningkatan retribusi daerah		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
			Persentase piutang pajak yang dapat ditagih		
				Badan Keuangan	1.830.246.394
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.417.131.706
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
			Indeks NSPK		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.261.469.100
			Indeks Profesionalitas Aparatur		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.113.473.270
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
			Indeks Profesionalitas Aparatur		
				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	917.272.470
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
			Indeks Inovasi Daerah		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	175.787.500
			:Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	143.822.000

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
			Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	139.523.800
			Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan indeks Inovasi Daerah		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	175.787.500
			:Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan Indeks Inovasi Daerah		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	601.357.400
			Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan ndeks Inovasi Daerah		
				Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	143.822.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		
				Inspektorat	6.656.405.373
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
			Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal		
				Inspektorat	924.571.170
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
			Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah		
				Inspektorat	487.798.800
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	15.748.848.821
			ilai SAKIP SKPD		
				Kecamatan Guguk Panjang	23.257.700
			Nilai SAKIP SKPD		
				Kecamatan Guguk Panjang	12.513.606.381
			---		
				Kecamatan Guguk Panjang	3.648.834.100
			Nilai		
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	133.368.550
			nilai saki		
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	11.480.689.821
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
			Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan		
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.833.678.849
			Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan		
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.833.678.849
			Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan		

**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	798.917.500
				Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan	
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.034.761.349
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Guguk Panjang	3.145.411.310
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Guguk Panjang	2.901.501.140
				Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Guguk Panjang	3.145.411.310
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Guguk Panjang	243.910.170
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.422.917.265
				Indeks Kenyamanan pelayanan	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	688.999.100
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	2.371.918.365
				Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.422.917.265
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	361.999.800
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan	
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	295.999.600
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.842.680.940
				persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	
				Kecamatan Guguk Panjang	1.784.808.314
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	
				Kecamatan Guguk Panjang	3.845.349.500
				0Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	30.000.000
				persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif	
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.796.560.940
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	101.572.000
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Penegakan Perda	
				Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	101.572.000



**Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi**

<b>No</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>SKPD Pelaksana</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
			Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan		
				Kecamatan Guguk Panjang	45.256.200
			Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tk Kecamatan		
				Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	71.307.140

Tabel 3.3

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>6. Pengembangan sosial kemasyarakatan</b>						
		Meningkatnya Kenyamanan Kota					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500	
				Persentase pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500	
				Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500	
				Persentase respon cepat kejadian bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	194.458.500	
		---					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				---			
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	361.994.100	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Gaji dan Tunjangan			
					Satuan Polisi Pamong Praja	6.417.795.081	
				Nilai Sakip			
					Satuan Polisi Pamong Praja	967.921.800	
				Sakip			
					Satuan Polisi Pamong Praja	19.590.000	
				Nilai SAKIP SKPD			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.557.978.350	
					Dinas Kebakaran	5.564.002.961	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase gangguan trantibum yang tertangani			
					Satuan Polisi Pamong Praja	18.748.532.060	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pembangunan Kembali Semua Prasarana dan Sarana Kelembagaan pada Wilayah Pasca Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930	
				Persentase Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik dan Masyarakat			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930	
				Persentase Respon Cepat Kejadian Bencana			
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.613.709.930	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				0Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran			
					Dinas Kebakaran	19.112.800	
				Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran			
					Dinas Kebakaran	92.104.750	
				persentase penurunan kejadian kebakaran			
					Dinas Kebakaran	2.152.001.050	
				persentase Penurunan Kejadian Kebakaran			
					Dinas Kebakaran	19.112.800	
				Persentase Penurunan Kejadian Kebakaran			
					Dinas Kebakaran	26.985.250	
				Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate)			
					Dinas Kebakaran	2.152.001.050	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran			
					Dinas Sosial	3.336.649.872	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial			
					Dinas Sosial	1.319.779.500	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana			
					Dinas Sosial	830.727.142	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial			
					Dinas Sosial	167.209.023	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Penanganan Bencana			
					Dinas Sosial	254.622.000	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
				Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Sosial	385.354.366		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	6.805.014.955		
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					
				Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.017.293.800		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				Rasio Kekerasan terhadap Perempuan				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	60.326.670		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
				Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.481.251.978		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					
				Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	14.867.800		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					
				Pokja KLA aktif				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	519.244.042		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					
				Persentase anak yang membutuhkan Perlindungan khusus yang terlayani				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	223.514.800		
				Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak )				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	88.191.800		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	160.653.900		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				Contraceptive Prevalence Rate (CPR)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	159.505.100		
				Contraceptive Prevalence Rate (CPR).				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.027.693.680		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB	1.110.482.460		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.097.465.024		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					
				JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	257.772.400		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.822.050.323		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	545.976.300		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					
				JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	631.349.000		
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					
				JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI				
					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.986.743.770		
<b>2</b>	<b>2. Pengembangan sektor pendidikan</b>							
		Meningkatnya kualitas pendidikan						
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					
				Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	803.801.400		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.000.000		
		---						
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Sakip				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.027.644.300		
				nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	428.478.940		
				Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105.532.742.702		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				Angka Putus Sekolah				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	198.815.800		
				Persentase Satuan Pendidikan Akreditasi A				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.204.961.104		
				Persentase Sekolah Akreditasi A				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.877.902.481		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai SNP				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.567.539.532		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.814.101.000		
				"Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	907.050.500		
				Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	298.766.592		
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					
				"Meningkatnya koleksi perpustakaan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.851.000		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	280.596.250		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					
				"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	56.209.100		
				"Meningkatnya Perlindungan Kearsipan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	66.837.000		
<b>3</b>	<b>5. Pengembangan tata kelola pemerintahan</b>							
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan						
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						
			Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi					
					Dinas Komunikasi dan Informatika	4.281.225.080		
			Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar					
					Dinas Komunikasi dan Informatika	4.281.225.080		
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
			Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	679.654.830		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	460.623.850		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	765.137.544		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	76.088.700		
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih						
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan Keuangan sesuai aturan				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase penyerapan belanja daerah				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Persentase penyerapan dana transfer				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
				Sistem terintegrasi				
					Badan Keuangan	1.336.647.280		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD				
					Badan Keuangan	2.460.404.310		
				Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD				
					Badan Keuangan	2.460.404.310		



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD			
					Badan Keuangan	2.460.404.310	
		---					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	36.740.000	
			---				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.665.969.805	
			Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.669.143.051	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	3.621.265.511	
			Tingkat Kepuasan terhadap layanan internal SKPD				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	19.200.000	
			Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan internal organisasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	146.491.000	
			Tingkat Kepuasan Terhadap Peleayanan Internalk Organisasi				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	3.223.424.611	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
			Nilai Kepuasan Komunikasi Publik				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	1.754.782.410	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
			Indeks Domain Layanan				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.140.612.540	
			Indeks Domain Layanan e-government				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	2.827.703.780	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
			Persentase Ketersediaan Data Sektoral				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	119.999.600	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
			Aplikasi dan Infrastruktur yang lulus uji BSSN				
					Dinas Komunikasi dan Informatika	95.044.500	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					
				"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.152.400		
			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					
				"Persentase Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip "				
					Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34.585.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Sakip SKPD				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.374.873.754		
				Nilai SAKIP SKPD				
					Sekretariat Daerah	19.293.800		
				Persentase capaian target penataan organisasi				
					Sekretariat Daerah	375.574.000		
				Persentase laporan keuangan yang tepat waktu				
					Sekretariat Daerah	13.638.094.000		
				Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana				
					Sekretariat Daerah	27.020.000		
				Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana KDH, WKDH, Sekretrais Daerah dan Sekretariat Daerah				
					Sekretariat Daerah	9.550.381.238		
				Persentase pelayanan kebutuhan sarana dan prasarana Sekretariat Daerah				
					Sekretariat Daerah	1.621.800.920		
				Persentase pelayanan kebutuhan sarana dsan prasarana K				
					Sekretariat Daerah	3.133.035.600		
				Persentase pelayanan kehumasan dan tamu				
					Sekretariat Daerah	3.897.718.710		
				Persentase pemenuhan kebutuhan Sekretariat Daerah				
					Sekretariat Daerah	4.101.551.320		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
					Sekretariat Daerah	931.877.100		
				Laporan penyelenggaraan pemerintahan				
					Sekretariat Daerah	106.750.000		
				Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan				
					Sekretariat Daerah	931.877.100		
				Persentase lembaga keagamaan yang aktif				
					Sekretariat Daerah	28.004.595.360		
				Persentase produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan per UU				
					Sekretariat Daerah	299.722.082		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
				Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	635.894.200		
				Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan				
					Sekretariat Daerah	160.618.600		
				Persentase realisasi belanja modal				
					Sekretariat Daerah	395.008.200		
				Persentase SKPD yang selesai mengentry SIRUP				
					Sekretariat Daerah	1.222.404.944		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai evaluasi AKIP SKPD				
					Sekretariat DPRD	22.229.800		
				Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah				
					Sekretariat DPRD	20.098.330.493		
				---				
					Sekretariat DPRD	90.500.000		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
				Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	21.891.159.462		
				Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD				
					Sekretariat DPRD	4.317.810.916		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	5.823.625.284		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	679.082.000		
				Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	163.708.300		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	581.555.600		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Badan Keuangan	12.530.510.905		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan Keuangan sesuai aturan				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase penyerapan belanja daerah				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Persentase penyerapan dana transfer				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
				Sistem terintegrasi				
					Badan Keuangan	23.206.591.178		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					
				Jumlah jenis pajak memakai sistem online				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Jumlah penambahan objek pajak baru				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Persentase Pajak Tertagih				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Persentase peningkatan pajak daerah				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Persentase peningkatan retribusi daerah				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
				Persentase piutang pajak yang dapat ditagih				
					Badan Keuangan	1.830.246.394		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.417.131.706		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Indeks NSPK				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.261.469.100		
				Indeks Profesionalitas Aparatur				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.113.473.270		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Indeks Profesionalitas Aparatur				
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	917.272.470		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
				Indeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	175.787.500		
				:Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	143.822.000		
				Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	139.523.800		
				Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan indeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	175.787.500		
				:Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan Indeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	601.357.400		
				Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset dan ndeks Inovasi Daerah				
					Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	143.822.000		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran				
					Inspektorat	6.656.405.373		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
				Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Inspektorat	924.571.170		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah				
					Inspektorat	487.798.800		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai SAKIP SKPD				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	15.748.848.821		
				ilai SAKIP SKPD				
					Kecamatan Guguk Panjang	23.257.700		
				Nilai SAKIP SKPD				
					Kecamatan Guguk Panjang	12.513.606.381		
				---				
					Kecamatan Guguk Panjang	3.648.834.100		
				Nilai				
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	146.668.550		
				nilai saki				
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	11.524.055.187		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.833.678.849		
				Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.833.678.849		
				Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	798.917.500		
				Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4.034.761.349		
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan				
					Kecamatan Guguk Panjang	3.145.411.310		
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan				
					Kecamatan Guguk Panjang	2.901.501.140		
				Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Guguk Panjang	3.145.411.310	
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan			
					Kecamatan Guguk Panjang	243.910.170	
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.422.917.265	
				Indeks Kenyamanan pelayanan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	688.999.100	
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	2.371.918.365	
				Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.422.917.265	
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	361.999.800	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	295.999.600	
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	3.842.680.940	
			persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif				
					Kecamatan Guguk Panjang	1.784.808.314	
			Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif				
					Kecamatan Guguk Panjang	3.845.349.500	
			0Persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif				
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	30.000.000	
			persentase lembaga kemasayarakatan yang aktif				
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	3.796.560.940	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
			Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum				
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	101.572.000	
			Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Penegakan Perda				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	101.572.000	
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan			
					Kecamatan Guguk Panjang	45.256.200	
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tk Kecamatan			
					Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	71.307.140	
<b>4</b>	<b>3. Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan</b>						
		---					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
			Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Kesehatan	57.146.886.399	
			Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan				
					Dinas Kesehatan	40.567.103.271	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
			Cakupan bayi usia kurang 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Cakupan kunjungan Antenatal				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Cakupan kunjungan balita				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Cakupan kunjungan neonatal				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Cakupan Universal Coverage (UHC)				
					Dinas Kesehatan	29.491.476.822	
			Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Persentase kasus DBD mendapat layanan kesehatan sesuai standar				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Persentase kasus HIV mendapat layanan kesehatan & pengobatan				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Persentase keberhasilan pengobatan TB BTA positif				
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
			Persentase Ketersediaan data yang berasal dari sistem aplikasi				
					Dinas Kesehatan	44.580.600	
			Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan				
					Dinas Kesehatan	512.325.700	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase masyarakat berisiko terdeteksi Diabetes Mellitus			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase masyarakat berisiko terdeteksi Hipertensi			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	664.067.710	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	19.850.618.474	
				Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelayanan di FKTP sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	29.491.476.822	
				Persentase ODGJ mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	8.085.680.000	
				Persentase perbaikan status gizi buruk dan kurang pada balita			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia			
					Dinas Kesehatan	8.509.169.698	
				Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	16.171.360.000	
				Persentase rumah sakit dan puskesmas yang melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD sesuai ketentuan			
					Dinas Kesehatan	29.491.476.822	
				Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	512.325.700	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	235.802.010	
				Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja			
					Dinas Kesehatan	242.932.010	
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				
				Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan			
					Dinas Kesehatan	218.259.300	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman			
					Dinas Kesehatan	218.259.300	
				Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan			
					Dinas Kesehatan	218.259.300	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				
				Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS			
					Dinas Kesehatan	221.010.800	
				Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif			
					Dinas Kesehatan	221.010.800	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai			
					Dinas Kesehatan	136.906.700	
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
					Dinas Kesehatan	90.576.400	
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga			
					Dinas Kesehatan	221.010.800	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Persentase laporan kepegawaian tepat waktu			
					Dinas Lingkungan Hidup	8.191.373.550	
				Persentase penyampaian dokumen perencanaan dan laporan keuangan tepat waktu			
					Dinas Lingkungan Hidup	13.052.039.789	
				Persentase sasaran, program kegiatan renja skpd yang selaras dengan renstra SKPD			
					Dinas Lingkungan Hidup	36.740.000	
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase usaha kegiatan yang diawasi			
					Dinas Lingkungan Hidup	332.777.600	
				---			
					Dinas Lingkungan Hidup	398.086.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
				Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	234.942.840	
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu			
					Dinas Lingkungan Hidup	234.942.840	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH			
					Dinas Lingkungan Hidup	2.147.279.650	
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati			

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Lingkungan Hidup	2.147.279.650		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang dikelola				
					Dinas Lingkungan Hidup	16.500.000		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase PPLH tersertifikasi				
					Dinas Lingkungan Hidup	73.713.300		
				Persentase usaha kegiatan yang diawasi				
					Dinas Lingkungan Hidup	73.713.300		
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					
				Persentase pengurangan sampah dimasyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	60.495.200		
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH				
					Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850		
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	237.980.850		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat				
					Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474		
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474		
				Persentase timbulan sampah				
					Dinas Lingkungan Hidup	13.700.153.474		
<b>5</b>	<b>4. Pengembangan pariwisata, seni budaya, dan olahraga</b>							
		Berkembangnya Ekspresi dan ekonomi pembangunan budaya daerah						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
			Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya					
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	631.625.000		
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
			Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya					
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	43.594.000		
		---						

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					
				Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.578.522.800		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					
				Meningkatnya Sportourism				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.264.760.028		
				Meningkatnya Sportourism dan Olahraga Prestasi				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	8.768.244.400		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					
				Presentase Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	500.796.500		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Warisan Budaya yang Dibina , Dikembangkan dan Dimanfaatkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	293.408.500		
				Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	135.602.700		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					
				Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	631.625.000		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					
				Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan di Kelola				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.660.100		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					
				Jumlah Museum yang Di kelola dan Dimanfaatkan				
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	685.682.208		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					
				Presentase Pengembangan Obyek Wisata				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	28.392.529.282		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan				
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.635.298.650		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					
				Jumlah Pesar Ekraf				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.073.027.866	
<b>6</b>	<b>1. Peningkatan ekonomi kerakyatan</b>						
		Meningkatnya daya beli masyarakat					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Nilai SAKIP SKPD					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	9.613.128.436	
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
		Persentase Koperasi Sehat					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	29.705.900	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					
		Persentase pertumbuhan koperasi					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	32.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
		Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.528.289.100	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
		Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.299.999.800	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Nilai SAKIP SKPD					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	286.567.912	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					
		persentase tertib niaga					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	14.896.900	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					
		Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	30.630.393.990	
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
		Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting					
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	177.464.740	
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					
		Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk ekspor					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	384.736.200		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
				Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan				
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	190.013.000		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					
				Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri				
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	1.381.811.170		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					
				Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.503.313.080		
				Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.503.313.080		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					
				Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	85.010.504		
			Meningkatnya investasi hijau					
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					
				Persentase kemudahan berusaha				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	375.224.800		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					
				Nilai realisasi investasi hijau				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	291.067.800		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	207.717.600		
			Meningkatnya kesempatan kerja					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.677.882.700		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.720.800		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase penurunan kasus hubungan industrial				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	21.049.100		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik					
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					
				Persentase unsur pelayanan berkategori baik				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.087.805.390		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					
				Persentase data informasi perizinan secara online				
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	19.406.700		
			Terbangunnya infrastruktur hijau					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan				
				Dinas Perhubungan		388.941.800		
				Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan				
				Dinas Perhubungan		388.941.800		
				Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas				

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Dinas Perhubungan	388.941.800	
				Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi			
					Dinas Perhubungan	388.941.800	
				Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan			
					Dinas Perhubungan	388.941.800	
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas			
					Dinas Perhubungan	388.941.800	
		Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				
				Konsumsi Energi per Kapita			
					Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400	
				Konsumsi Protein per Kapita			
					Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400	
				Margin Tataniaga Pangan Utama			
					Dinas Pertanian dan Pangan	39.517.400	
		Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan					
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Nilai produksi pertanian (padi)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804	
				Nilai produksi pertanian (tanaman hias)			
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804	
				persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian			
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804	
				Persentase pengembangan produk pertanian			
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804	
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
				Persentase Sekolah Akreditasi A			
					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.500.000	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai SAKIP SKPD			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.267.900	
				NILAI SAKIP SKPD			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.904.372.151	



**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Persentase daerah irigasi yang ber kondisi baik				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.490.556.017		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	445.888.600		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					
				Persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	213.291.400		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				Persentase pengurangan titik genangan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.688.828.840		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase bangunan gedung hijau				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.336.057.650		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan ber kondisi mantap				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.355.668.609		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Persentase bangunan gedung hijau				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	46.951.750		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					
				Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.010.036.791		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				---				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	102.628.100		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				---				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	10.391.100		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					
				---				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.153.323.000		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				Persentase PSU yang layak				
					Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	12.089.102.214		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Nilai Sakip SKPD				
					Dinas Pertanian dan Pangan	9.136.205.111		
				Nilai SAKIP SKPD				
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.088.571.520		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Konsumsi energi perkapita				
					Dinas Pertanian dan Pangan	15.692.400		
				Konsumsi energi per kapita				
					Dinas Pertanian dan Pangan	419.112.200		
				Konsumsi protein perkapita				
					Dinas Pertanian dan Pangan	15.692.400		
				Konsumsi protein per kalpita				
					Dinas Pertanian dan Pangan	419.112.200		
				Margin tataniaga pangan utama				
					Dinas Pertanian dan Pangan	434.804.600		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi diatas ambang batas				
					Dinas Pertanian dan Pangan	18.590.000		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					
				Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.771.900		
			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					
				Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.014.000		
			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					
				Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan				
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.297.800		
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.837.940	
			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				
				Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	333.666.910	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				---			
					Dinas Perhubungan	12.974.164.280	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
				Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap			
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.447.389.520	
				---			
					Dinas Perhubungan	3.116.788.680	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro			
					Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	5.163.047.094	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Sakip SKPD			
					Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.259.912.356	
				Nilai SAKIP SKPD			
					Dinas Pertanian dan Pangan	15.281.700	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Nilai produksi perikanan budidaya			
					Dinas Pertanian dan Pangan	734.588.110	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				
				Persentase pengembangan produk perikanan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	238.851.880	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
				Nilai Sakip SKPD			
					Dinas Pertanian dan Pangan	4.528.300	
				Nilai SAKIP SKPD			
					Dinas Pertanian dan Pangan	89.773.500	

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				0Nilai produksi Pertanian (padi)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	17.814.300		
				Nilai produksi pertanian (padi)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.014.446.804		
				Nilai produksi pertanian (tanaman hias)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	1.989.446.804		
				Nilai produksi pertanian (Tanaman hias)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	25.000.000		
				Nilai produksi Pertanian (Tanaman hias)				
					Dinas Pertanian dan Pangan	17.814.300		
				Persentase maningkatnya pengolahan hasil pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	25.000.000		
				Persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.007.261.104		
				Persentase pengembangan produk pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	2.032.261.104		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				Indeks ketersediaan prasarana pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	8.379.085.200		
				Laju konversei lahan pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	17.650.000		
				Laju konversi lahan pertanian				
					Dinas Pertanian dan Pangan	8.361.435.200		
				Persentase prasarana pertanian yang fungsional				
					Dinas Pertanian dan Pangan	8.379.085.200		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				Persentase pengembangan produk peternakan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	59.999.804		
				Persentase pengembangan produk peternakan				
					Dinas Pertanian dan Pangan	467.946.884		

**Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah**

<b>No</b>	<b>Prioritas Prov/Kab/Kota</b>	<b>Sasaran Prioritas</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>SKPD Pelaksana Program Prioritas</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>Ket</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
				Persentase penurunan kasus hewan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	240.983.440	
				Persentase penurunan kasus Penyakit hewan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	59.999.804	
				Persentase penurunan kasus penyakit hewan			
					Dinas Pertanian dan Pangan	226.963.444	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase peningkatan kelas kelompok tani			
					Dinas Pertanian dan Pangan	516.974.740	

**Tabel 3.4**  
**Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja**

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>										
	<b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip	A -	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 Persen	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan yang tepat waktu	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN dan Tunjangan yang Dibayarkan	919 orang / tahun	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Disiplin ASN	100 %	1.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli	90 stel	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	13 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	14 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	19 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	21 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	22 Paket			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	23 Paket			

No	Program	Program		Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Sub Kegiatan		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 31 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 33 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 36 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 39 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 43 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 57 Paket Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 68 Paket			
				1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	6 item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan yang dibeli, cetak nametag pegawai	10 item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum yang Dibeli	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat dan lembur yang dibeli Rakor, sosialisasi dan perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Bukittinggi		
			1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Bukittinggi		
			1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa urusan Pemerintah yang Disediakan	2 Jasa	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya, yang di beli	3220 buah	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Optimalisasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik DISDIKBUD	6 Rekening / bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang terpelihara	100 Persen	1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direnovasi jasa kebersihan kantor yang disediakan peralatan kebersihan yang disediakan	12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Sekolah Akreditasi A	84.25 %	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah Dasar Akreditasi A	80 %	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Lainnya Yang Dibangun	10 Paket	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah Yang Di rehab	2 Paket	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang dibeli	1 Ls	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah alat rumah tangga SD yang dibeli	2 Paket	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang di Beli	3147 siswa	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dipelihara	2 Paket		
							1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	16 Paket	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan 65 Satuan Pendidikan	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	65 Satuan Pendidikan	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	80 Satuan Pendidikan	Kota Bukittinggi	
							1.01.02.2.01.26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	668 Orang	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	484 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	65 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 19 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah Menengah Pertama Akreditasi A	60 %	1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dibangun	4 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 ls		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Di rehab	1 ls		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang dibeli	1 Ls		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa Yang di Beli	1360 siswa		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Dipelihara	1 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah sekolah yang melaksanakan priose belajar dan ujian bagi peserta didik	1 Satuan Pendidikan 15 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang akan dievaluasi	25 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Honorarium dan Insentif bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Honorarium pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Pertama	278 orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	351 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	50 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan 7 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan	12 bulan	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		Kota Bukittinggi	
				Persentase Sekolah PAUD Akreditasi A	15 Persen	1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Peserta Didik 1 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Meningkatkan Pengelolaan PAUD dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (PBM)	70 orang		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.03.15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima insentif dan dikontrak sekolah	464 orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pemeriksaan berkas TPG, PPG dan angka kredit guru	3 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	117 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.03.19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD bagi Lembaga PAUD	117 Lembaga		Kota Bukittinggi	
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lancarnya PBM di Satuan Pendidikan Lancarnya PMB di Satuan Pendidikan Persentase Sekolah Kesetaraan Akreditasi A	12 bulan 12 Bulan 60 %	1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Program Kebutuhan Dasar (Paket A, B, C)	1 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	1 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah tutor yang mengikuti workshop peningkatan kompetensi Tutor PNF/Kesetaraan	40 orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah guru dan pegawai yang dikontrak di SPNF	10 orang		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemeriksaan berkas TPG dan PPG	19 orang		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	7 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1 Satuan Pendidikan		Kota Bukittinggi	
						1.01.02.2.04.18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah lembaga yang ditingkatkan kapasitas pengelolaan dana BOP Kesetaraan bagi SPNF SKB dan PKBM	7 Lembaga		Kota Bukittinggi	
	<b>1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	20 %	1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan	1 Kurikulum	1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	16 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	24 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal SD dan SMP yang Tersedia	9 Dokumen		
	<b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP	100 %	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sesuai Kebutuhan	100 Persen	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sistem Pendataan dan Pemetaan GTK	4 Dokumen	Kota Bukittinggi	
	<b>1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Sekolah yang memiliki izin	100 %	1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Pendidikan Dasar memiliki izin	100 %	1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan PAUD yang layak untuk mendapatkan perizinan	45 Satuan PAUD	Kota Bukittinggi	
	<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD Persentase ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	A 90 %	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	6 dokumen 90 % 100 %	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan Persentase Ketersediaan data pencapaian kinerja dan keuangan	6 dokumen 100 %	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	391 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan pakaian dinas ASN	100 %	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	398 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	1.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	44 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan administrasi perkantoran	90 %	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat	100 %	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Kota Bukittinggi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes dan rujukan	95 %	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi pengawasan pemakaian obat rasional di fasyankes	12 kali	1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	Kota Bukittinggi	
		Persentase peningkatan sarana dan prasana pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	80 %		Jumlah paket obat dan perbekalan kesehatan di fasyankes	10 paket					
		Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	90 %		Persentase ketersediaan sarana Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai standar	90 %					
		Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar	90 0%								
		Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	90 %								
						1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Pembantu yang direhab/dipelihara	1 Unit	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50 Paket	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	50 Paket	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance Siaga Yang Dipelihara	1 unit	Kota Bukittinggi		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi 100 %</p> <p>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 90 %</p> <p>Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 90 %</p> <p>persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 100 %</p> <p>Persentase puskesmas yang melaksanakan klas ibu hamil 100 %</p> <p>persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD 100 %</p> <p>Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia 100 %</p>		1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1995 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1910 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1870 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9550 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4720 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64920 Orang	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8500 Orang	Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31900 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1150 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	300 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7450 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1410 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		Kota Bukittinggi	
						1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan pada lokasi bencana Jumlah pertemuan pengendalian krisis kesehatan Persentase data faktor resiko bencana yang terkumpul pada saat bencana dan pasca bencana	100 % 1 kali 100 %		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit		Semua Kab/Kota	
					1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
					1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 90 % Persentase sistem informasi pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat 85 %		1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
			1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes yang mengikuti penilaian akreditasi 100 % Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 94 % persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan 100 % persentase puskesmas dan rumah sakit yang melaksanakan BLUD 100 %		1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	Kota Bukittinggi		
						1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	8 Unit	Kota Bukittinggi		
	<b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan para medis di puskesmas dan Rumah sakit sesuai analisa beban kerja	80 %	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar 80 %	1.02.03.2.01.01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	200 Dokumen	Semua Kab/Kota		
			1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar 90 % Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai standar 80 %		1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	300 Orang	Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Kota Bukittinggi Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1 dokumen  90 %	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman Tingkat pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan	90 % 70 % 85 %	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Frekuensi pembinaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah paket pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	12 kali 10 paket	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	200 Sarana	Kota Bukittinggi	
				1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	70 %	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
				1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	70 %	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase pengawasan Industri makanan dan minuman	70 %	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	20 Unit	Kota Bukittinggi		
	<b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	80 %	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase dunia usaha yang memanfaatkan CSRnya untuk program kesehatan	15 %	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
		Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif	100 %		Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	75 %					
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	65 %		Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif	100 %					
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS Tingkat Kota	35 %	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	Kota Bukittinggi		
				Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	100 %						
				Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif	100 %						
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %						
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok sasaran mendapatkan pembinaan PHBS	80 %	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Kota Bukittinggi		
				Persentase kelurahan yang mendapatkan pembinaan kelurahan siaga aktif	100 %						
				Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %						
				Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	65 %						
	<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	NILAI SAKIP SKPD	A 0	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	2 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %	1.03.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	1 ls	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 % 100 %	1.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket 124 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket 27 Paket 39 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	1.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
				Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100 %						
						1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik 100 % Persentase tertib administrasi barang milik daerah 100 %		1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.03.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Persentase daerah irigasi yang berkondisi baik	74,71 %	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana irigasi	80 %	1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Kota Bukittinggi	
				1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sarana prasarana irigasi yang berkualitas untuk mendukung infrastruktur pangan	80 %	1.03.02.2.02.02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	1 KM	Kota Bukittinggi	
						1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1 KM		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 KM	Kota Bukittinggi		
						1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	11 Unit	Kota Bukittinggi		
	<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga	97 %	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan SPAM jaringan perpipaan	80 %	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	15 Liter/Detik	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	15 Liter/Detik	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.03.03.2.01.07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	50 SR	Semua Kab/Kota		
						1.03.03.2.01.12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
	<b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah	60 %	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	80 %	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	10 M <sup>3</sup> /Hari	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Persentase pengurangan titik genangan	100 %	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas prasarana lingkungan	80 %	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	642 M	Kota Bukittinggi	
							1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	677 M	Kota Bukittinggi	
							1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	1200 M	Kota Bukittinggi	
	<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Persentase bangunan gedung hijau	5 %	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	80 %	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.03.08.2.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	300 Unit	Kota Bukittinggi	
	<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	89,45 %	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya laik fungsi jalan	80 %	1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 KM	Kota Bukittinggi	
							1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 KM	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	600 M	Kota Bukittinggi		
						1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	241.3 M	Kota Bukittinggi		
	<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Persentase bangunan gedung hijau	80 %	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	80 %	1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	4 Dokumen	Kota Bukittinggi		
						1.03.11.2.02.10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
	<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	62 %	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rencana tata ruang yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan	80 %	1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	Kota Bukittinggi		
				1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	80 %	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	300 Dokumen	Kota Bukittinggi	
				1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	80 %	1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Kota Bukittinggi		
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
	<b>1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya kualitas pengelolaan SAKIP	A 0	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan kunjungan yang difasilitasi	0 Laporan 36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan 127096000 Rupiah	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos yang diadakan	2 item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit 16 unit 0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah honor pegawai kontrak yang dibayarkan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	12 bulan 40 item		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen			
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah paket pengelolaan rumah susun yang difasilitasi	0 Laporan 3 paket			
						1.04.02.2.05.02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	42 unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni	0.24 %	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 bulan		
	<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Proporsi Luas Kawasan Kumuh	26.55 Ha	1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan Kumuh yang dientaskan	26.55 %	1.04.03.2.01.02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	2 Dokumen		
							1.04.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	12 bulan		
				1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan		
				1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
							1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	1 Ha		
							1.04.03.2.03.07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 aplikasi		
	<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Proporsi Rumah Tangga yang Tinggal di Rumah Layak	0.24 %	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Rumah layak Huni	0.24 %	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.04.04.2.01.02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0 Dokumen		
	<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase PSU yang layak	90 %	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Drainase lingkungan yang berkondisi mantap	90 %	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen		
							1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	0 Lokasi		
								Jumlah TPU yang Dipelihara	1 TPU		
								panjang Drainase Lingkungan yang Dibangun	1250 meter		
								Panjang Drainase Lingkungan yang Dipelihara	400 meter		
								Panjang Drainase Lingkungan yang Direhabilitasi	2710 meter		
								Panjang Jalan Lingkung yang Dibangun	2350 meter		
								Panjang Jalan Lingkung yang Dipelihara	2500 meter		
								Panjang Jalan Lingkung yang Direhabilitasi/ Ditingkatkan	4600 meter		
							1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>											
	<b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	A	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 Persen	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
		Nilai SAKIP SKPD	A .					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
		Sakip	BB -		Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 %		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Persentase Tertib Administrasi Keuangan Persentase Tertib Administrasi Keuangan	14 bulan 100 % 100 Persen	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bulan 34 Orang/bulan 65 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 % 100 Persen	1.05.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	64 Paket 65 Paket 68 Stel	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 Persen	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Jenis 14 Paket 16 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket 37 Paket 39 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Jenis			
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 Paket			
						1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	306 Laporan			
						1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53 Laporan			
							Jumlah porsi makan minum lembur	1 ls			
			1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 %	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			
							Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	60 Surat			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan			
						1.05.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan			
			1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 Persen	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
				Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100 %		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			
						1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit			
						1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Jenis		Semua Kab/Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kab/Kota Bukittinggi	
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		
							1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Semua Kab/Kota Bukittinggi	
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
								Jumlah paket tenaga kebersihan	1 paket		
	<b>1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	90 persen	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penegakan perda	95 persen	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Kasus		
							1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus		
							1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		
							1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang		
				1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan perlindungan masyarakat	55 persen	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan			
						1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan			
			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase anggota PPNS yang di fasilitasi	100 persen	1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan			
	<b>1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana 87 % Persentase Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana 90 % Persentase pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana 87 % Persentase Pembangunan Kembali Semua Prasarana dan Sarana Kelembagaan pada Wilayah Pasca Bencana 90 % Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat 87 % Persentase Perbaikan dan Pemulihan Semua Aspek Pelayanan Publik dan Masyarakat 90 % Persentase respon cepat kejadian bencana 87 % Persentase Respon Cepat Kejadian Bencana 90 %	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penerima Informasi dan Data Dampak Bencana	90 %	1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	2 Dokumen	Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	3600 Orang	Kota Bukittinggi	
			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Masyarakat yang Teredukasi tentang Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana  Persentase Relawan dan Badan Usaha yang Terlibat dan Dilatih dalam Kebencanaan	90 %  90 %	1.05.03.2.02.01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	64 Orang	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	31 Unit	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Persentase Kerugian Akibat Bencana yang Tertanggulangi	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	20 Orang	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
				1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Korban Bencana yang Terselamatkan dan Terevakuasi	90 %	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	0 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang	Kota Bukittinggi	
							1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Bahan Logistik yang disediakan	2 jenis/tahun	Kota Bukittinggi	
	<b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	persentase penurunan kejadian kebakaran Tingkat Waktu Tanggap ( Respon Time Rate)	10,5 menit 10,5 menit	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan lainnya yang Tertib Prosedur	100 Persen	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan jasa informasi pencegahan kebakaran	6 Jenis	Kota Bukittinggi	
							1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 laporan	Kota Bukittinggi	
							1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	180 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Jenis	Kota Bukittinggi	
							1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat/Pelatihan	60 Orang	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	50 Dokumen		Semua Kab/Kota	
			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Meningkatnya Pengawasan Pencegahan Kebakaran	48 Persen	1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60 Dokumen		Kota Bukittinggi	
			1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase investigasi kebakaran yang dilaksanakan	100 Persen	1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	50 Dokumen		Kota Bukittinggi	
			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	65 Persen	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang		Semua Kab/Kota	
						1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	24 Desa/Kelurahan		Kota Bukittinggi	
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>											
	<b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	100 %	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu ( )	100 %	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan 14 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	6 Bulan tersusun	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi kepegawaian kantor	100 %	1.06.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.06.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		Kota Bukittinggi	
			1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan administrasi kantor	90 %	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik terbeli Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis 0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laptop yang dibeli	2 Buah		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis AKT terbeli Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	41 Jenis 0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum tamu dinas, rapat dan lembur Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan Perjalanan Dinas	12 Bulan 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	1.06.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda dua dibeli	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Bukittinggi		
			1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, peranko, dan beda pos lainnya tersedia	500 Lembar	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar	7 Rekening	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan 0 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat terpeliharanya Barang Milik Daerah	90 %	1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kantor	12 Bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan kebersihan kantor Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan 4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	70 %	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Daerah Kabupaten/ Kota	75 %	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pilar - pilar sosial terbina (TKSK)	3 Orang		
							1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga		
							1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga		
							1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Sertifikat		
	<b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	70 %	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar	80 %	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Lanjut Usia Miskin non Produktif yang diberi permakanan tambahan Jumlah Lanjut Usia Miskin Produktif yang dilatih dan diberi bantuan usaha. Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	275 Orang 24 Orang 0 Orang		
							1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		
							1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		
			1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi Sosial	70 %		1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
							1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks warga binaan LP yang ditingkatkan kemandiriannya Jumlah pengurus dan anggota KUBE ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PMKS yang menerima pemberdayaan dan ditingkatkan kemandiriannya (anak terlantar)	24 Orang 775 Orang 0 Orang 50 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan									
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.					
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	<b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	70 %	1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak-anak terlantar dipelihara	75 %	1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							
									1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang					
									1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akurasi Data Penduduk Miskin	80 %	1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	0 Orang		
												1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Keluarga		
												1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		
	<b>1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase Penanganan Bencana	100 %	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapat perlindungan sosial	100 %	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							
									1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang 0 Orang					
												1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang		
												1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	80 %	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung			
						1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang			
	<b>1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	80 %	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman makam pahlawan	12 Bulan	1.06.07.2.01.01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
						1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pemeliharaan TMP Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	12 Bulan 0 Makam			
						1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	12 Laporan			
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>											
	<b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	2 %	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran pencari kerja yang bersertifikat kewirausahaan dan keterampilan	55 persen	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	368 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	150 orang	2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang memiliki kartu pencari kerja	100 persen	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	150 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	0 %	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani dengan baik Persentase perusahaan yang dilakukan pembinaan	100 persen 60 persen	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	Semua Kab/Kota	
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
	<b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	A Tingkatan	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	87 Persen	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan.	100 Persen	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	2.08.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 Persen	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	70 %		2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	14 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		2.08.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	80 %		2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit R2 6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.08.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
	<b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	Persentase Lembaga Pemerintah yang Mendukung Kesetaraan Gender	21,43 %	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Focal Point Aktif	90 %	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	
				2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan Aktif di Organisasi Perempuan	10 %	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	Semua Kab/Kota	
	<b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	7,21 Rasio	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang terlayani	100 %	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang	Semua Kab/Kota	
	<b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	80 %	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang mendapat pembinaan peningkatan kualitas ketahanan keluarga	10.15 %	2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	384 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen 12 Laporan			
	<b>2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak	100 %	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/SKPD yang menyediakan data terpilah	30 Lembaga	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Pokja KLA aktif	15 Pokja	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase indikator Pemenuhan Hak Anak	60 %	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	50 Organisasi	Semua Kab/Kota	
							2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	90 %	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Semua Kab/Kota	
	<b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak )	0,26 %	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang membutuhkan Perlindungan khusus yang terlayani	70 %	2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus (15 kategori anak )	0.26 %	2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan		Semua Kab/Kota	
						2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen		Semua Kab/Kota	
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>											
	<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip SKPD	A nilai	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	2 dokumen	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	100 %	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan Kinerja SKPD	100 %	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	2.09.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program kegiatan SKPD	100 %	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja dan Program Kegiatan SKPD	100 %	2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b>	"Ketersediaan energi dan protein per kapita Ketersediaan energi per kapita Ketersediaan pangan utama Ketersediaan protein per kapita Koefisien Variation (CV) Harga Beras Kota Bukittinggi	"19,268 ≥ 2400, ≥ 63 Ton; Kkal/gr/hari ; gr/kap/hari > =2400 kkal/kap/hr 18.974 ton 63 gr/kap/hr < =3 %v	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana lumbung pangan	100 %	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia Jumlah sarana pendukung yang disediakan	0 Unit 1 unit		
							2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Volume pangan pokok yang dijadikan modal LUPM	0 Laporan 2 ton/GKP		
	<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Konsumsi energi perkapita Konsumsi Energi per Kapita Konsumsi protein perkapita Konsumsi Protein per Kapita Margin tataniaga pangan utama Margin Tataniaga Pangan Utama	2112,9 kkal/kap/hr ≥ 2100 kkal/kap/hr 61,9 gr/kap/hari > =57 gr/kap/hr 7,69 % ≤10 %	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1. Persentase peningkatan ketersediaan pangan menurut produksi (ton) 2. Persentase peningkatan ketersediaan energi (kkal/kapita/hari) 3. Persentase peningkatan ketersediaan protein dan lemak (gram/kapita/hari) Persentase pemantauan harga	80 %   100 %	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Jumlah dokumen kajian pasokan bahan pangan Jumlah dokumen NBM Jumlah Informasi Harga Pangan	12 Laporan 1 Dokumen 1 dokumen 12 bulan		
							2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok yang dibantu Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	8 kelompok 12 Laporan		
							2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan TTIC Kota Bukittinggi yang dibantu	0 Unit 2 TTIC		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton		Kota Bukittinggi	
			2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase capaian skor polapangan harapan	100 %	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah bibit yang diserahkan kepada masyarakat Jumlah kelurahan yang dibantu Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah peserta lomba B2SA Jumlah peserta lomba pengolahan pangan lokal Jumlah peserta sosialisasi B2SA	5000 bibit 24 kelurahan 9 Laporan 24 kelurahan 24 kelurahan 720 org			
						2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
	<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Ketersediaan "18.974 ≥ 2400, ≥ 63 Ton; energi dan Kkal/kap/hari;gr/kap/haro protein perkapita Ketersediaan 10 ton pangan pangan utama Ketersediaan 20000 ton pangan utama	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase aspek ketersediaan pangan; Persentase aspek akses pangan; Persentase aspek pemanfaatan pangan	80 %	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Peta FSVA Jumlah peta SKPG Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen			
			2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah	10 %	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan utama yang diadakan Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 ton 0 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi diatas ambang batas	24 %	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komoditi PSHT yang aman dikonsumsi Persentase komoditi yang aman dikonsumsi	90 % 90 %	2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jenis komoditi yang diuji Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11 jenis 720 org 1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis alat untuk pengujian mutu dn keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25 alat uji 1 Dokumen		
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>											
	<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	80 %	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80 %	2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Kota Bukittinggi	
	<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	100 %	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80 %	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Kota Bukittinggi	
	<b>2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	80 %	2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya permasalahan pertanahan	80 %	2.10.07.2.01.03 Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	10 Dokumen	Kota Bukittinggi	
	<b>2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	80 %	2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah	Tertatanya ruang kota	80 %	2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	67 Dokumen	Kota Bukittinggi	
	<b>2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	80 %	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya ruang kota	80 %	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
							2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Dokumen	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>													
	<b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase sasaran, program kegiatan renja skpd yang selaras dengan renstra SKPD	96 %	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan tepat waktu	95 %	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya persentase laporan keuangan tepat waktu	95 %	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 Orang/bulan			Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	97 %	2.11.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	2 unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tercapainya persentase laporan keuangan tepat waktu	95 %	2.11.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen				
				2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap	93 %	2.11.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					Persentase ASN yang hadir tepat waktu	97 %							
					Persentase KGB ASN tepat waktu	94 %							
					Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	83 %							
				2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap	93 %	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 jenis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					Persentase ASN yang hadir tepat waktu	97 %							
					Persentase KGB ASN tepat waktu	94 %							
					Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	83 %							



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 jenis 0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 jenis 0 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makanan dan minuman tamu	0 Laporan 12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan 0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawainnya lengkap 93 % Persentase ASN yang hadir tepat waktu 97 % Persentase KGB ASN tepat waktu 94 % Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik 83 %	2.11.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan kendaraan roda 2 Mobil tangga	0 Unit 1 unit 1 unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket 1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					2.11.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pool kendaraan	0 Unit 1 Paket		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	93 % 97 % 94 % 83 %	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat pos yang diadakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah paket pengiriman yang dibayarkan	131 buah 0 Laporan 9 kali	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah tagihan air PDAM yang dibayarkan Jumlah tagihan internet yang dibayarkan Jumlah tagihan rekening telepon / fax yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	0 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN yang dokumen kepegawaiannya lengkap Persentase ASN yang hadir tepat waktu Persentase KGB ASN tepat waktu Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	93 % 97 % 94 % 83 %	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan 0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit 12 bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.11.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara mlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit 12 bulan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.11.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Semua Kab/Kota	
	<b>2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase usaha kegiatan yang diawasi	42 %	2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pengelolaan air Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	100 % 6 %	2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen DDDTLH Dokumen RPPLH Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen 1 dokumen 0 Dokumen		
							2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	DIKPLHD Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen 0 Dokumen		
				2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	65 % 87.5 %	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase parameter dibawah baku mutu air Persentase parameter dibawah baku mutu udara	65 % 87.5 %	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen kajian daya tampung daya dukung beban sungai Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah titik pantau dan diperolehnya data tentang air, sungai, tanah dan udara yang akurat	1 dokumen 0 Dokumen 12 titik pantau		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah kampung iklim yang dibina	0 Dokumen 3 kelompok			
						2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Jumlah sampel air yang diperiksa kualitasnya	0 Dokumen 50 sampel			
	<b>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH 20 % Persentase penambahan vegetasi di taman kehati 20 %	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah tanaman di taman kehati 30 % Persentase penyisipan tanaman di RTH 30 %	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Identifikasi Pohon Pelindung Luas RTH yang dikelola Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Perencanaan taman kehati Ranperda Pengelolaan RTH	1 Dokumen 5.9 Ha 0 Ha 1 Dokumen 1 Dokumen				
	<b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang dikelola 7 %	2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin yang melakukan pengelolaan LB3 7 %	2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya Jumlah usaha / kegiatan yang dikelola limbah B3 yang dikelola	0 Dokumen 50 Usaha / Kegiatan				
	<b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase PPLH tersertifikasi 22 % Persentase usaha kegiatan yang diawasi 42 %	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan 11 % Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan pengelolaan air 100 % Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan 5 %	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan (SKKLH, PPKLH, Persetujuan Teknis)	0 Dokumen 100 %				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan		
								Jumlah usaha / kegiatan yang diawasi	50 usaha / kegiatan		
	<b>2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	Persentase pengurangan sampah di masyarakat	27 %	2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	5 %	2.11.07.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen data kebijakan dan kearifan lokal (inventarisasi kebijakan dan kearifan lokal terkait PPLH di Kecamatan Guguak Panjang)	1 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0 Dokumen		
	<b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	20 %	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah	8 %	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0 Dokumen		
		Persentase pengurangan sampah di masyarakat	27 %		Persentase penyisipan tanaman di RTH	30 %		Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD dan SLTP	10 sekolah		
		Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	10 %		Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	5 %		Jumlah siswa pramuka yang menerapkan Saka Kalpataru	30 siswa		
							2.11.08.2.01.03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0 Orang		
								Jumlah media informasi	5 media		
	<b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	10 %	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah	8 %	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas		
								Jumlah penilaian lingkungan hidup	6 kali penilaian		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase usaha kegiatan yang diawasi	42 %	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase usaha kegiatan yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	6 %	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPHL yang ditindaklanjuti Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	20 pengaduan 0 Dokumen		
	<b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase pengurangan sampah di masyarakat Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah Persentase timbulan sampah	27 % 5 % 100 %	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	Persentase institusi pemerintah yang melakukan pengelolaan sampah Persentase kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga Persentase penanganan sampah Persentase pengurangan sampah Persentase perkantoran swasta yang melakukan pengelolaan sampah Persentase sarana dan prasarana penanganan sampah sesuai standar Persentase sarana dan prasarana pengurangan sampah sesuai standar Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengelolaan sampah	8 % 5 % 88 % 4 % 5 % 80 % 70 % 5 %	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Review Dokumen JAKSTRADA Pengelolaan Sampah	1 Dokumen		
							2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah kompos yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	300 ton/tahun 0 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah kali razia penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah tonase sampah yang diangkut ke TPA Regional Jumlah TPSS dan TPST yang disemprot	24 kali 0 Ton 45.625 ton/tahun 68 unit			
						2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah peserta budidaya magot dan peserta pembinaan bank sampah	0 Kelompok 5 kelompok			
						2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan persampahan yang diadakan Kendaraan operasional yang dipelihara	0 Dokumen 26 Jenis 12 Bulan	Semua Kab/Kota		
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>											
	<b>2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	BB .	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang tersedia	100 %	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan yang diberikan Persentase layanan umum dan kepegawaian yang diberikan	100 % 100 %	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi BMD yang diberikan	100 %	2.12.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian yang diberikan	100 %	2.12.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang diberikan	100 %	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD yang dilaksanakan	100 %	2.12.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		



No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 100 %	2.12.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara 100 %	2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
	<b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	88 %	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88 %	2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	29500 Dokumen	Kota Bukittinggi			
Jumlah KIA yang diterbitkan								5000 Dokumen	Jumlah KK yang diterbitkan			8000 Dokumen	Jumlah KTP yang diterbitkan
							2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	Kota Bukittinggi			
				2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	88 %	2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	8 Dokumen	Kota Bukittinggi			
	<b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	88 %	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	88 %	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan,	3000 akta	Kota Bukittinggi			
Jumlah akta kematian yang diterbitkan								500 akta	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan			10 akta	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang dilaksanakan	4 Layanan 5000 pelayanan		Kota Bukittinggi	
	<b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	92 %	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92 %	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						2.12.04.2.01.02 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		Kota Bukittinggi	
				2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92 %	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Jasa Pengelolaan Aplikasi Pendukung SIAK yang tersedia Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Peralatan Pendukung SIAK yang dibeli Jumlah Peralatan Pendukung SIAK yang dipelihara Jumlah SDM Pengelola SIAK yang mengikuti Bimtek/Diklat/ Sosialisasi/ Koordinasi	2 Paket 12 Laporan 26 Unit 8 Jenis 8 Orang	Kota Bukittinggi	
						2.12.04.2.03.07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	3 Laporan		Kota Bukittinggi	
				2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang diolah dan dapat disajikan	92 %	2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan 72 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	92 %	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang dipublikasikan	92 %	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	80 Dokumen	Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	60 Dokumen	Kota Bukittinggi	
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
	<b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0,43 Indeks	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sinkronisasi Kebijakan yang mengatur tentang Kualitas dan Kuantitas Penduduk	1 Kebijakan	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	Semua Kab/Kota	
				2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk	127 Penduduk	2.14.02.2.02.03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Contraceptive Prevalence Rate (CPR).	68,35 %	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4 Organisasi	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	Semua Kab/Kota	
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	24 PPKBK		
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	95 Poktan		
								Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	165 Sub PPKBK		
			2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PUS yang Ingin BerKB Tidak Terpenuhi (unmetneed)	21.57 %	2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	1.835 Orang	Semua Kab/Kota		
			2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB Paripurna	1 Kampung KB	2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	7 Laporan	Semua Kab/Kota		
	<b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 PPKS	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Fungsi Reproduksi, Fungsi Perlindungan dan Fungsi Ekonomi	100 %	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	99 Unit	Semua Kab/Kota	
						2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	60 Orang	Semua Kab/Kota		
						2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Uppks)	2 Laporan	Semua Kab/Kota		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan		Semua Kab/Kota	
						2.14.04.2.01.09 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
			2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan tahapan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	30 %	2.14.04.2.02.04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	3 Laporan		Semua Kab/Kota	
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>											
	<b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.15.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia	1 paket			
							Jumlah Tenaga Keamanan yang tersedia	1 Paket			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Item 6 Jenis 8 Item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Item 28 Item 47 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Item 3 Jenis 3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
					2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Makan minum tamu dan lembur yang tersedia Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang di ikuti Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang di ikuti dan makan minum lembur yang tersedia Persentase rapat, koordinasi sosialisasi dan koordinasi yang di ikuti dan makan minum lembur yang tersedia	0 Laporan 300 porsi 12 bulan 1 Ls 12 Bulan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.15.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Kota Bukittinggi		
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, prangko dan cek teraan yang dibeli	3 jenis		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
					2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah rekening Air, Listrik dan Internet yang dibayarkan Jumlah rekening telepon, Air dan Listrik yang dibayarkan Jumlah rekening telepon, Air dan Listrik yang terbayar	0 Laporan 5 Rekening 1 Rekening 13 rekening		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer, printer, HT dan peralatan lainnya	1 Ls		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BBM, Jasa Kebersihan dan lembur ramchek BBM, Rehab gedung parkir roda 4, jasa kebersihan, Upah dan lembur PNS dan Non PNS, dan pengadaan peralatan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Ls 4 Paket 0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan Persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	86 100 % 85 % 60 % 55 % 70 % C	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya laik fungsi jalan Persentase perlengkapan jalan yang terpasang	80 % 65 %	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 jenis 110 Unit	Kota Bukittinggi	
						2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1485 Jenis 4200 Unit		Kota Bukittinggi	
				2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Gedung	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/pelajar/lembaga yang diberi penyuluhan	200 peserta		Kota Bukittinggi		
					2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	0 Laporan		Kota Bukittinggi		
					2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50 PNS & Non PNS		Kota Bukittinggi		
			2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Rumusan		Kota Bukittinggi		
			2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	75 Rekomendasi		Kota Bukittinggi		
			2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.15.02.2.11.02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan		Kota Bukittinggi		
			2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.15.02.2.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Peserta sosialisasi				
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD BB nilai	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen peloparan perencanaan tepat waktu	3 dokumen	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen				
			Jumlah laporan keuangan tepat waktu	12 bulan							
			2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan ADM Kepegawaian sesuai SOP	4 buah		2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
			2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
			2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sarpras yang tersedia	4 buah		2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
							2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
							2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
							2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
			2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah asset yang diadakan	15 unit	2.16.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan sarpras sesuai SOP	4 buah	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aseet yang dipelihara	20 buah	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			
							2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	85 persen	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga komunikasi sosial yang dilakukan pendampingan	1500 informasi	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
					Jumlah Pengaduan Publik yang ditindaklanjuti	400 konten					
							2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0 Dokumen			
						2.16.02.2.01.07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan			
						2.16.02.2.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen			
						2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	2 Dokumen			
	<b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	Indeks Domain Layanan Indeks Domain Layanan e-government Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar	03,2 skor 3,2 skor	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan Jumlah infrastruktur jaringan yang dipelihara Jumlah infrastruktur TIK yang diadakan Jumlah regulasi terkait aplikasi yang ditetapkan Jumlah SKPD dan Area Publik yang terhubung dengan jaringan FO kapasitas bandwith yang ditingkatkan	4 aplikasi 120 titik 3 unit 1 buah 50 koneksi 500 Mbps	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	120 Unit		
				2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah monev SPBE yang dilaksanakan Jumlah regulasi tentang aplikasi yang ditetapkan	1 kali 4 buah	2.16.03.2.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							2.16.03.2.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit		
							2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	0 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>											
	<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	BB	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
				2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100 %	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
					Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %		2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang berondisi baik	100 %	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
	<b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Persentase Koperasi Sehat	18 %	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi yang Pelaksanaan Aktivasnya sesuai dengan Aturan Perundang-undangan	18 %	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Unit Usaha		
	<b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Persentase pertumbuhan koperasi	2 %	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang		
				2.17.05.2.03 Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.17.05.2.03.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Pengelolaan Usaha	0 orang		
	<b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi	13 %	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu Persentase koperasi yang taat SOP	48 % 63 %	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	125 orang		
	<b>2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro	10 %	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	jumlah kontrak yang terjalin pada event pameran Jumlah pelaku usaha mikro yang menjalin kemitraan	4 kontrak 10 umkm	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	40 Unit Usaha		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	70 Unit Usaha			
	<b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	1 %	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi pelatihan	3 %	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2593 Unit Usaha		
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>											
	<b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip SKPD	BB BB	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi Program dan kegiatan	100 Persen	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 persen	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2.18.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.18.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang 30 Orang	Kota Bukittinggi	
				2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum perangkat Daerah	100 Persen	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.18.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 persen		2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman paket Jumlah buku cek Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Materai 10000	12 Bulan 4 Buah 0 Laporan 2 Laporan 200 Buah	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 persen		2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	Persentase kemudahan berusaha	100 %	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan regulasi penanaman modal	100 persen	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	Nilai realisasi investasi hijau	60 Milyar Rupiah	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan media dan sarana promosi Persentase penambahan jumlah investor	55 persen 8 persen	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah web promosi yang dikelola	1 Dok 0 Dokumen 1 Web		
							2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	<b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase unsur pelayanan berkategori baik	80 %	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan online tepat waktu Persentase pemenuhan regulasi pelayanan perizinan Persentase pengaduan perizinan selesai tepat waktu	100 persen 100 persen 100 persen	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3000 Pelaku Usaha		
							2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	300 Kegiatan Usaha		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	50 Orang			
	<b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	55 %	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	55 persen	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	12 Kegiatan Usaha.		
						2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Laporan penanaman modal perusahaan Jumlah perusahaan yang mengikuti sosialisasi	0 Kegiatan Usaha 1 Laporan 1 Laporan			
	<b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	Persentase data informasi perizinan secara online	100 %	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan dan informasi perizinan tepat waktu	100 persen	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	300 Dokumen		
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
	<b>2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	Presentase Pemuda Berprestasi dan berkreasi	25 %	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	25 %	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50 Orang		
							2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	10 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang dibina Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Jumlah peserta pelatihan paskibraka Jumlah Upacara yang dilaksanakan	40 orang 0 Orang 100 orang 3 upacara		
							2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	90 Orang		
			2.19.02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	50 %		2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Jumlah peserta pelatihan Organisasi kepemudaan (KNPI)	0 Dokumen 40 orang		
	<b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	Meningkatnya Sportourism dan Olahraga Prestasi	3 Event Olahraga	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sportourism dan olahraga Prestasi	3 event	2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Tim yang mengikuti kejuaraan	0 Dokumen 25 tim		
							2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Yang mengikuti kejuaraan olahraga tingkat kota, propinsi dan nasional Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100 orang 0 Dokumen		
				2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Presentase Peningkatan Sportourism	85 %	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan jumlah cabor yang difasilitasi/bina	0 Orang 23 Cabor		
				2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Sportourism dan olahraga Prestasi	3 event	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga masyarakat yang difasilitasi Tingkat Kota, Propinsi dan Nasional Olahraga yang difasilitasi	0 Dokumen 40 kali		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana olahraga yang diberikan kepada masyarakat Jumlah sarana olahraga yang di pelihara dan direvitalisasi	5 paket 5 sarana			
						2.19.03.2.05.04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Atraksi Olahraga Minat Khusus yang difasilitasi Olahraga Minat khusus yang dikembangkan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7 Olahraga 0 Dokumen			
						2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Olahraga pacu kudo yang difasilitasi	0 Dokumen 2 event			
	<b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	Presentase Kegiatan Kepemudaan yang difasilitasi	85 %	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Presentase Kegiatan Kepramukaan Presentase Organisasi Keperamukaan	85 % 85 %	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase kegiatan kepramukaan yang difasilitasi	85 Persen		
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
	<b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	Persentase Ketersediaan Data Sektoral	70 persen	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Buku Bukittingggi Dalam Angka Jumlah Data Sektoral ekonomi dan infrastruktur tersedia	1 buku 5 buah	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dokumen		
							2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	4 Orang		
							2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit		
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
	<b>2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	Aplikasi dan Infrastruktur yang lulus uji BSSN	48 persen	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi Pemda yang diamankan Jumlah sertifikat digital yang ditindak lanjuti	450 informasi 4 SKPD	2.21.02.2.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah		
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>											
	<b>2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan	2 Warisan Budaya	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even yang diadakan dan dikuti	2 Kegiatan	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	1 Warisan	Kota Bukittinggi	
				2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah WBTB yang dilestarikan	29 WBTB	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah inventarisasi dan dokumentasi WBTB	2 Objek	Kota Bukittinggi	
				2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga Adat yang Dibina	9 Lembaga Adat	2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	lancarnya operasional lembaga adat	9 lembaga	Kota Bukittinggi	
	<b>2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya Jumlah Warisan budaya yang Dilestarikan, dikelola dan dimanfaatkan	1 warisan budaya 2 Warisan Budaya	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sanggar yang Di Bina	8 Sanggar	2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Warisan budaya tak benda yang dilestarikan	2 objek	Kota Bukittinggi	
	<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan di Kelola	1 warisan budaya 100 %	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Jumlah ODBC yang didaftarkan/ditetapkan	137 Gagor Budaya 123 CB	2.22.05.2.01.01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek	Kota Bukittinggi	
							2.22.05.2.01.02 Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	Kota Bukittinggi	
				2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar budaya Yang dikelola	10 Cagar budaya	2.22.05.2.02.02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	Kota Bukittinggi	
							2.22.05.2.02.03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	Jumlah Museum yang Di kelola dan Dimanfaatkan	2 Museum	2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum Yang Dikelola	2 Museum	2.22.06.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dikelola	200 koleksi	Kota Bukittinggi	
							2.22.06.2.01.02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang	Kota Bukittinggi	
							2.22.06.2.01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah museum yang aktif dikelola	2 museum	Kota Bukittinggi	
							2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sara dan prasarana museum yang tersedia	2 museum	Kota Bukittinggi	
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>											
	<b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	A A	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN tersedia	12 Bulan	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan nilai EKPPD	100 %	2.23.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Harian ASN	29 Stel	2.23.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	29 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.23.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang		
				2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	2.23.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			
			2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.23.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %		2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat "Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan "	A BAIK BAIK BAIK BAIK BAIK	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan yang sesuai standar	40 %	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 Layanan		
							2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan		
							2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	0 Eksemplar 100 Eksemplar		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan			
						2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan			
						2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang			
						2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	3 Layanan			
						2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	100 Eksemplar			
						2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	100 Eksemplar			
						2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
			2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	"Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat "	80 BAIK	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus 3 Lokus			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan 30 Orang			
						2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	0 Orang 6 Orang			
						2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	20 Perpustakaan			
						2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	5 Orang			
	<b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	"Meningkatnya koleksi perpustakaan "	10 %	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	"Tercapainya Penyelamatan Bahan Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara " Tercapainya Penyelamatan Bahan Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara	3 File 3 File	2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	25 Orang		
							2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	25 Eksemplar		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	"Tercapainya Penyelamatan Bahan 3 File Pustaka, Naskah Kuno dan Koleksi Etnis Nusantara "		2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 0 Eksemplar			
							2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan 50 Eksemplar			
							2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan 50 Eksemplar			
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>											
	<b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	"Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan "	53,57 %	2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku 4 Ormas  Jumlah SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku 5 SKPD		2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 1 Berkas			
							2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 Berkas Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 1 Berkas			
							2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan			
				2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	1 Daftar	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 1 Arsip Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI 1 Arsip			
				2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Pelayanan Kearsipan "	1 Dokumen	2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 10 Pengguna			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan			
	<b>2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	"Meningkatnya Perlindungan Kearsipan "	0,8 %	2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun "Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	1 Berkas 3 SKPD	2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1 Arsip		
				2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	"Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Kearsipan "	3 SKPD	2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1 Arsip		
	<b>2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	"Persentase Meningkatnya Perizinan Penggunaan Arsip "	40 %	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	"Persentase Meningkatnya Regulasi Kearsipan "	20 %	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	2 SOP		
							2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	1 Arsip		
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											
	<b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	A Nilai	3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaiak kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							3.25.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Bukittinggi	
	<b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Nilai produksi perikanan budidaya	9.471.120 ribuan rupiah	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Nilai produksi perikanan	9471120 ribuan rupiah	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pendampingan teknologi budidaya perikanan	0 Kelompok 8 kelompok		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Nilai produksi perikanan budidaya Nilai produksi perikanan budidaya	9471120 ribuan rupiah 9471120 ribuan rupiah	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kolam, Bak, Saluran yang terehab	1 Unit 0 Unit 1 Unit 1 LS	Kota Bukittinggi	
							3.25.04.2.04.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikan Jumlah produksi ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	239430 ekor 440 ton 1 Unit	Kota Bukittinggi	
	<b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Persentase pengembangan produk perikanan Persentase pengembangan produk perikanan	5 % 5 %	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase pengembangan produk perikanan	5 %	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Angka konsumsi ikan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	44 Kg/kap/th 1 Unit Usaha		
				3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengembangan produk perikanan	5 %	3.25.06.2.03.02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Jumlah peserta pelatihan pengolahan produk perikanan	0 Pelaku Usaha 20 org		
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>											
	<b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja, Renja perubahan yang tersusun tepat waktu	3 dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	jasa pengaman kantor Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 bulan 0 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.26.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah peralatan listrik terbeli	5 Item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor Yang Dibeli	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis ATK terbeli	25 item	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetakan jumlah penggandaan	5 item 10500 lembar	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat tamu dan lembur yang tersedia makan minumnya Persentase undangan perjalanan dinas untuk rakor, konsultasi, sosialisasi yang diikuti	95 Persen 75 Persen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit 0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai 10000 terbeli	370 buah	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening terbayar (telepon, air dan listrik)	36 rekening		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
			3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip SKPD	0 BB	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 yang terpelihara Jumlah kendaraan roda 3 yang terpelihara Jumlah kendaraan roda 4 yang terpelihara	10 unit 1 unit 6 unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa cleaning service yang dibayarkan	2 orang		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						3.26.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Semua Kab/Kota	
	<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	75 %	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	75 %	3.26.02.2.01.02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
							3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi		
			3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	68 %	3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Jumlah Pegawai kontrak yang dibayarkan gajinya Lembur jam kerja, lembur hari libur dan lembur khusus Outsourcing Keamanan Outsourcing Kebersihan	0 Kawasan 20 orang 1 Ls 1 paket 1 paket			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota "Lanjutan kandang Zona Karnivora Pengamanan tebing TMSBK"	0 Unit 1 Zona		
						3.26.02.2.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sosialisasi, pembinaan, perlombaan desa wisata dan pokdarwis	80 orang		
						3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Makan Hewan dan pemeliharaan satwa penambahan koleksi satwa	130 spesies 6 Jenis		
			3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	68 %	3.26.02.2.03.02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 Dokumen		
						3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lobang Jepang Menyala Pengembangan Wisata Kotobarangai	0 Lokasi 1 Objek 1 DTW		
						3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi yang dikelola Kebersihan dan keamanan jumlah Pegawai Kontrak yang dibayarkan gajinya Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Destinasi 27 orang 0 Unit		
						3.26.02.2.03.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM tentang Geopark Ngarai Sianok Maninjau	50 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	538777 Orang	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	4 Pasar	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen		
							3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah event pariwisata yang difasilitasi Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 event 0 Laporan 5 Laporan		
							3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		
	<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah Pasar Ekraf	5 Pasar	3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pasar Ekraf	5 Pasar	3.26.04.2.01.01 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		
	<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah Pasar Ekraf	5 Pasar	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pasar Ekraf	5 Pasar	3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang		
							3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah kegiatan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kota maupun pemerintah pusat. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah penampilan kesenian yang difasilitasi dan di tampilkan	40 kali 5 Laporan 50 kali		
							3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang 500 Orang		
			3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pasar Ekraf	5 Pasar		3.26.05.2.02.02 Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha peserta pelatihan di dunia usaha	1 Laporan 20 orang		
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>											
	<b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai Sakip SKPD	A Nilai	3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan SKPD	100 %	3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan Kegiatan SKPD	100 %	3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD Persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan SKPD	100 % 100 %	3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Nilai produksi pertanian (padi)	6.7 Ton/Ha	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok penerima bantuan alsin	11 kelompok	3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah bantuan alsintan	10 unit		
		Nilai produksi pertanian (padi)	6,8 ton/ha		Jumlah kelompok pengelola pangan lokal yang dibina	16 kelompok		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	1 laporan		
		Nilai produksi pertanian (tanaman hias)	3 %					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	0 Laporan		
		Nilai produksi pertanian (tanaman hias)	3,5 %					Jumlah rekomendasi pupuk bersubsidi yang disalurkan	200 ton		
		persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian	3 %								
		Persentase meningkatnya pengolahan hasil pertanian	2 %								
		Persentase pengembangan produk pertanian	1 %								
		Persentase pengembangan produk pertanian	2 %								
						3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Peserta Pelatihan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan	2 kelompok			
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	0 Laporan			
							Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus UPJA	30 Org			
				3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai produksi pertanian	6.7 ton/ha	3.27.02.2.02.01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah benih padi unggul yang disalurkan	0.4 Ha		
							Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0 VUB			
							Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB			
							Luas sawah padi organik	0.05 Ha			
							3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit ternak yang disalurkan	4 paket		
							Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen			
							Terlayannya perkawinan kuda bibit	35 kali			
							Tersedianya SDG kuda bibit baru	0 ekor			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.27.02.2.02.03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Pameran hortikultura Terlaksananya pengembangan tanaman hortikultura Ubinan	2 kelompok 2 kali 6 paket 21 kali			
			3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi ternak	2 %	3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah acara promosi peternakan atau lives stock expo Tk. Provinsi sumbar yang diikuti Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 kali 1 Laporan			
			3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi ternak	2 %	3.27.02.2.05.06 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Laporan Sikomandan Laporan Statistik peternakan	0 Laporan 14 Laporan 12 laporan 2 laporan	Kota Bukittinggi		
	<b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	Indeks ketersediaan prasarana pertanian 0.5 % Laju konversei lahan pertanian 0.05 Ha Persentase prasarana pertanian yang fungsional 100 %	3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	Regulasi LP2B	1 Dokumen	3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Regulasi LP2B	0 Dokumen 1 Ls Operasional LP2B			
						3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Laporan UPSUS /KSA	0 Laporan 12 Laporan			
			3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	5 %	3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Panjang jaringan irigasi yang di bangun dan direhabilitasi	0 Unit 300 m			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			
						3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	400 m	Kota Bukittinggi	
						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah destinasi agrowisata yang representatif	3 lokasi			
						3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit			
	<b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase pengembangan produk peternakan	8 persen	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	4 %	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah peserta sosialisasi penyalit hewan	25 org		
		Persentase penurunan kasus Penyakit hewan	4 %				Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan			
							Zero kasus penyakit menular hewan dan zoonosis	0 kasus			
				3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kesehatan hewan	50 %	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	0 Laporan		
							Jumlah vaksinasi rabies	1000 ekor			
							Pemeriksaan hewan Kurban	1000 ekor			
							Pemeriksaan kesehatan hewan besar	30 ekor			
							Pengobatan hewan kesayangan	4200 ekor			
							Sterilisasi HPR	20 ekor			
				3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk peternakan yang dioalh	8 %	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	6201 ekor		
					Persentase produk peternakanyang dioalh	8 %		Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	0 Laporan		
							Jumlah peserta pelatihan pengolahan produk peternakan	25 org			
							3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	Persentase pengendalian hama / penyakit tanaman	100 %	3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian hamandan penyakit tanaman yang tertanggulangi	100 %	3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah lokasi pengendalian hama tikus dan ulat pada tanaman pertanian Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Jumlah pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	3 lokasi 0 Ha		
	<b>3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	Margin tata niaga hasil pertanian	24 %	3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hasil pertanian yang dijual secara marketplace/ teknologi	100 %	3.27.06.2.01.02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Monitoring perkembangan usaha pertanian dan perikanan	0 Dokumen 1 laporan		
	<b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	15 %	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian	25 %	3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Diikutinya Pekan Nasional Tani Tingkat Nasional Jumlah kategori penghargaan yang diberikan kepada penyuluh dan kelembagaan Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah poktan yang ditingkatkan kelasnya	1 kali 10 kategori 10 Unit 10 poktan		
							3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Fasilitasi kebutuhan BPP Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pelaksanaan demplot cabe Pelaksanaan kursus teknologi budidaya bawang merah Pelaksanaan training penyuluhan Penyusunan dokumen programa kecamatan , kota	12 bulan 1 Unit 1 demplot 1 demplot 34 kali 2 dokumen		
	<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>										



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan											
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian									
	<b>3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	BB	3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi								
Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran					100 %													
													3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
													3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
													3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
													3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
												3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.30.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
															3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
												3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi
						3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi									

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	persentase tertib niaga	49 %	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin gudang	10 pelaku usaha	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10 Dokumen		
				3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki legalitas usaha waralaba dalam negeri	10 pelaku usaha	3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 Dokumen		
	<b>3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar	20 %	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan kriteria pasar ber SNI	20 %	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		
					Persentase pemenuhan kriteria pengelolaan pasar ber SNI	80 %					
							3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		
				3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pedagang yang telah mentaati aturan	85 %	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8670 Dokumen		
							3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		
	<b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting	80 %	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat kota	80 %	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 Laporan		
				3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase harga barang pokok dan barang penting yang terkendali di tingkat kota	80 %	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan		
							3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	240 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			
			3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	100 %	3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 Laporan			
	<b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk ekspor	0 %	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Pameran Produk Ekspor  Jumlah Pembinaan, Pengembangan dan Pameran Produk Ekspor	0 0  2 kali	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	0 Pelaku Usaha		
						3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6 Pelaku Usaha			
						3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha			
	<b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan	63 %	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang bertanda sah  Persentase BDKT yg beredar sesuai standar	55 %  70 %	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1100 Unit		
						3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang			
	<b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Persentase peningkatan jejaring perdagangan produk dalam negeri	5 %	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah mitra usaha yg terjalin pada iven perdagangan	5 orang	3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	47 UMKM		
						3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	0 Dokumen			
	<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>										

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	60 % 2 %	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi produk Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen	150 IKM 150 IKM 235 IKM	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		
							3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen		
							3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		
	<b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	55 %	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data dan informasi industri	80 %	3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen		
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>											
	<b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	BB 0	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan	3 dok	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 4 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rencana anggaran terhadap realisasi anggaran	80 %	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	116 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		
							4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan sosialisasi peraturan per UU	1 laporan	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	97 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	12 bulan	4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	12 bulan	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	202 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	12 bulan	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	101 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit			
						4.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	Semua Kab/Kota		
			4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			
						4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket			

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Sekretariat Daerah	12 bulan	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jasa upah kerja pegawai kontrak Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Sarana dan prasarana rumah dinas Walikota	7 orang 0 Paket 17 Paket 1 unit			
						4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah upah pegawai kontrak	0 Paket 17 Paket 5 orang			
						4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	6 Paket			
			4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100 %	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen			
						4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan publik 0 Laporan Publik dan Tata Laksana			
						4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan pelaksanaan 8 area perubahan Peraturan/keputusan tentang standar kompetensi jabatan	1 Dokumen 1 dokumen			
			4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan kehumasan dan tamu	90 %	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Penunjang untuk keprotokolan dan pantap agenda pimpinan uang lembur PNS dan Non PNS	12 Laporan 50 orang 50 orang			
						4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan			
						4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	0	0 0	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	Laporan penyelenggaraan pemerintahan	3 laporan	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 Dokumen		
		Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan	80 %					kalender penyelenggaraan pemerintahan kota bukittinggintahan	165 Dokumen		
							4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0 Dokumen		
								jumlah kelurahan yang difasilitasi	2 kel		
								jumlah kelurahan yang dinilai tingkat kota	24 kel		
								jumlah koordinasi kegiatan yang bersifat monitoring dan pembinaan	3 kali		
								pembinaan kelurahan untuk tinhkat propinsi	1 kel		
							4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah laporan SPM dan Monev	1 laporan		
								laporan EKPPD	1 laporan		
								LKPJ Pemerintah Kota Bukittinggi	1 laporan		
								LPPD Pemerintah Kota Bukittinggi	1 laporan		
								Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	78 BB		
								Upacara hari pahlawan	1 kali		



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kesejahteraan sosial dan masyarakat	80 %	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	frekuensi rapat koordinasi bidang bina mental	5 kali		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen		
								jumlah fasilitator kegiatan pengiriman kafilah dan peninjau lomba tingkat propinsi dan nasional	7 orang		
								jumlah kafilah utusan MTQ tingkat Propinsi	90 orang		
								Jumlah kegiatan Khatam qur	70 lembaga		
								jumlah masjid/mushallah yang dikunjungi pada pelaksanaan safari ramadhan kota bukittinggi	150 masjid/mushalla		
								jumlah masjid/mushalla yang diberikan honor untuk penceramah ramadhan di kota bukittinggi	150 masjid/mushalla		
								jumlah pengurus masjid yang di latih	50 orang		
								jumlah peserta pembinaan dan pelatihan remaja masjid	50 orang		
								jumlah tabligh akbar	3 event		
								jumlah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi dai/mubalig	25 orang		
								wirid pengajian	10 kali		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	frekuensi pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB jumlah kalender hijriyah jumlah lembaga yang menerima bantuan sosial dan hibah jumlah lembaga yang mengikuti lomba DDS kota bukittinggi	5 kali 0 Dokumen 900 bh 40 lembaga 6 lembaga			
					4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas jumlah guru garin yang diberi bantuan jumlah jamaah haji yang difasilitasi jumlah kelurahan yang pendidikan keagamaan yang dibina pelaksanaan rapat koordinasi bidang kesejahteraan masyarakat	1 Dokumen 881 orang 300 orang 24 kelurahan 5 kali	Kota Bukittinggi		
			4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Perda , Perwako, dan SK yang tertib administrasi	335 produk	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah penyusunan perda yang difasilitasi jumlah penyusunan perwako tyang difasilityasi jumlah penyusunan SK yang difasilitasi Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 perda 30 perwako 300 SK 0 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum jumlah laoran perkara yang difasilitasi laporan rencana aksi hak asasi manusia di kota bukittinggi	0 Kasus 4 laporan 1 laporan			
						4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	buku lembaran daerah dokumen hukum yang dipublikasikan di laman JDIH jenis produk hukum yang didokumentasikan	200 buku 50 peraturan 3 jenis			
			4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Mou pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lain	5 MOU	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Iuran APEKSI Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri MOU Pemerintah Kota Bukittinggi dengan pihak lainri	1 kali 0 Dokumen 3 MOU			
	<b>4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Jumlah kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan	20 rekomendasi	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Laporan pelaksanaan	1 laporan	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen		
							4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	105 Laporan		
							4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		
							4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1 Dokumen		
				4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Realisasi anggaran belanja modal dan pelaksanaan barang dan jasa SKPD sesuai regulasi	80 %	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Nilai SAKIP	0 Dokumen 1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan jumlah pengadaan barang dan jasa terkontrak Pelaksanaan monitoring belanja modal	0 Laporan 600 dokumen 50 BM		
							4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan jumlah SKPD yang real anggarannya lebih dari 80%	0 Laporan 26 Laporan		
			4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa tepat waktu dan sesuai aturan	91 %		4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket barang dan jasa Pemerintah yang terlaksana untuk seluruh SKPD dalam satu tahun	120 paket		
							4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan melalui LPSE	120 paket		
							4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pegawai yang memiliki kompetensi pengelolaan pengadaan barang dan jasa	1 laporan		
			4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Laporan monitoring evaluasi pengawasan dan pembinaan energi dan sumber daya mineral	1 laporan		4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen		
							4.01.03.2.04.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.01.03.2.04.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>											
	<b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai evaluasi AKIP SKPD Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	83 persen 100 persen	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 persen	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan	39 orang 18 laporan	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	Semua Kab/Kota	
				4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah tenaga pengamanan kantor	5 orang	4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			4.02.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket 25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.02.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	2 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan 16 jenis	16 jenis	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
				Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 51 buah	51 buah						
				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 21 buah	21 buah						
				Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi 115 dokumen	115 dokumen						
				Jumlah penggandaan dan barang cetakan yang disediakan 103403 lembar	103403 lembar						
				Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan 3 buah	3 buah						
				Jumlah tamu yang dilayani 5000 orang	5000 orang						
						4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kendaraan dinas / jabatan	3 unit		4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rekening listrik, air telepon dan internet dibayar	12 jenis		4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab	2 unit		4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	19 unit						
				Jumlah kendaraan perorangan dinas yang dipelihara	14 unit						
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	20 jenis						
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / rehab	11 jenis						
							4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Semua Kab/Kota	
						4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Kota Bukittinggi	
			4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan medical check up Jumlah pakaian dinas dan atribut anggota DPRD yang tersedianya	25 orang 25 orang 125 stel	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan		Kota Bukittinggi	
						4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	25 Paket		Kota Bukittinggi	
						4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		Kota Bukittinggi	
			4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah dokumen data - data keanggotaan DPRD yang dikelola Jumlah kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi	25 dokumen 12 jenis	4.02.01.2.16.01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket		Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Persetase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 persen	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen propemperda yang disusun 1 dokumen Jumlah rapat - rapat pansus, gabungan komisi, paripurna internal dan paripurna yang difasilitasi 50 kali Jumlah rapat terkait kajian perundangan - undangan yang difasilitasi 5 kali Jumlah rapat yang difasilitasi terkait penyusunan naskah akademik 10 kali	1 dokumen	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
				4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan APBD 10 kali Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan APBD perubahan 10 kali Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan KUA dan PPAS 10 kali Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan laporan semester 10 kali Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD 10 kali Jumlah fasilitasi rapat terkait pembahasan perubahan KUA dan PPAS 10 kali	10 kali	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
			4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	<p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan penggunaan anggaran 24 kali</p> <p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan 24 kali</p> <p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur 24 kali</p> <p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat 24 kali</p> <p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan dan hukum 24 kali</p> <p>Jumlah rapat, koordinasi, kunjungan kerja terkait pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian 24 kali</p>		4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6 Laporan	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	5 Laporan	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4 Dokumen	Kota Bukittinggi	
			4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah bimbingan teknis DPRD yang diikuti dalam 1 tahun Jumlah dokumen program kerja DPRD Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD Jumlah tenaga ahli fraksi yang tersedia	8 kali 1 dokumen 1000 buah 6 fraksi		4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	100 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
							4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen	Kota Bukittinggi	
			4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pikir yang disusun dan disampaikan tepat waktu ke Bapelitbang Jumlah reses yang dilaksanakan dalam 1 tahun	50 dokumen 84 kali		4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	15 Dokumen	Kota Bukittinggi	
			4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah peraturan DPRD terkait kode etik tersusun Jumlah rapat, koordinasi dan kunjungan kerja terkait pengawasan kode etik DPRD yang dilaksanakan	84 kali 12 kali		4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	Kota Bukittinggi	
							4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan	Kota Bukittinggi	
			4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun Jumlah rapat badan musyawarah Jumlah rapat paripurna istimewa DPRD yang dilaksanakan dalam 1 tahun	200 laporan 1 dokumen 15 kali 6 kali		4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	2 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 2 Dokumen	Kota Bukittinggi		
<b>5.01 PERENCANAAN</b>										
	<b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	Bb Nilai	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang sinkron dengan Dokumen Perencanaan Kota	100 %	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	100 %	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	5.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 23 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
			5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	5.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
						5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
						5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
			5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan SKPD	100 %	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
						5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
						5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Bukittinggi		
	<b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	80 %	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah respon masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Pesertanse keterwakilan stakeholder dalam penyusunan perencanaan	84 % 84 %	5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Berita acara konsultasi publik	1 dokumen		
						5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Bukittinggi		
						5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	
			5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan data perencanaan pembangunan	84 %	5.01.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang		Kota Bukittinggi	
			5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Target Kinerja RPJMD yang terpenuhi	85 %	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7 Laporan		Kota Bukittinggi	
	<b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	100 %	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Proviinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	5 Dok 9 Dok	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen	Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
			5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan tingkat Proviinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	10 Dok 6 Rekomendasi	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		Kota Bukittinggi	
			5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah analisis tematik yang dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan tingkat Provinsi/ pusat yang ditindaklanjuti	4 Dok 6 Rekomendasi	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		Kota Bukittinggi	
						5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan		Kota Bukittinggi	
<b>5.02 KEUANGAN</b>											
	<b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP	100 Persen	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Program dan kegiatan yang selaras	100 Persen	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kualitas pelayanan internal	100 Persen	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jasa pengamanan kantor terbayarkan	5 Orang	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	87 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
			5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kualitas Pelayanan Internal	100 Persen	5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						5.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	2 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	
						5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Semua Kab/Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	100 Persen	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	APBD ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember	100 Persen	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	
		Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	100 Persen		Persentase kesesuaian penempatan rekening penganggaran	100 Persen					
		Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu	100 Persen		Persentase nomenklatur kegiatan APBD sama dengan KUA PPAS	100 Persen					
		Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	100 Persen		Persentase pengalokasian anggaran belanja sesuai aturan	100 Persen					
		Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	100 Persen								
		Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	100 Persen								
		Persentase penyerapan belanja daerah	100 Persen								
		Persentase penyerapan dana transfer	100 Persen								
		Sistem terintegrasi	100 Persen								
							5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen		Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen		Semua Kab/Kota	
			5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dana DAK yang dapat diserap Kontribusi optimalisasi kas Penyampaian laporan dana transfer sebelum sepuluh hari kerja setiap triwulan berakhir Persentase kesesuaian data penerimaan daerah dengan Rekening Kasda Persentase kesesuaian perhitungan gaji dengan KP4 Persentase SP2D SKPD diterbitkan 1 hari setelah SPM diterima	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	600 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	4 Dokumen		Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	9 Dokumen		Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
					5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	168 Laporan	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
					5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 0 temuan Jumlah temuan BPK terhadap LKPD 0 Temuan Jumlah temuan BPK yang dapat ditindaklanjuti dari semua temuan pra opini 100 Persen Penyampaian laporan keuangan sebelum tanggal 20 setiap bulannya 100 Persen Penyampaian LKPD ke BPK sebelum 31 Maret 100 Persen		5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan		Semua Kab/Kota		
						5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 12 Dokumen		Semua Kab/Kota		
						5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 14 Laporan		Semua Kab/Kota		
						5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 37 Laporan		Semua Kab/Kota		
						5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen		Semua Kab/Kota		
						5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen		Semua Kab/Kota		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	8 Lembaga	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.03.13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
			5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tata kelola keuangan	100 Persen		5.02.02.2.04.01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Semua Kab/Kota	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		Semua Kab/Kota	
			5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Sistem terintegrasi	6 Bidang	5.02.02.2.05.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen		Semua Kab/Kota	
						5.02.02.2.05.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		Semua Kab/Kota	
	<b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Jumlah jenis informasi data pengelolaan BMD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD	12 jenis 0 temuan 0,5 %	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah informasi data pengelolaan BMD Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtanggankan terhadap PAD	12 Dokumen 0 Temuan 0.1 Persen	5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	28 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		Semua Kab/Kota	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang		Semua Kab/Kota	
	<b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Jumlah jenis pajak memakai sistem online 10 Objek	100 Persen	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis pajak memakai sistem online 10 Objek	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		Semua Kab/Kota	
		Jumlah penambahan objek pajak baru 100 Persen	100 Persen		Jumlah penambahan objek pajak baru 20 Persen						
		Persentase Pajak Tertagih 100 Persen	100 Persen		Persentase Pajak Tertagih 100 Persen						
		Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah 100 Persen	100 Persen		Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah 100 Persen						
		Persentase peningkatan pajak daerah 20 Persen	20 Persen		Persentase peningkatan pajak daerah 20 Persen						
		Persentase peningkatan retribusi daerah 0.5 Persen	0.5 Persen		Persentase peningkatan retribusi daerah 0.5 Persen						
		Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 100 Persen	100 Persen		Persentase piutang pajak yang dapat ditagih 100 Persen						
						5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota	
						5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	6 Unit		Semua Kab/Kota	
						5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		Semua Kab/Kota	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	7500 Obyek Pajak	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4600 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	9 Layanan	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kab/Kota	
							5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	Semua Kab/Kota	
	<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>										
	<b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	84.00 Persen	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 Persen	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang		
				5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
			5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100 Persen	5.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	87 Persen	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	Semua Kab/Kota		
	<b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Indeks NSPK	72,0 Persen	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	100 Persen	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen		
						5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen		
						5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		
						5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		
			5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	100 Persen	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen		
						5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen		
						5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen		
			5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan	2 Persen	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	195 Orang		
				Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Persen	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	2 Dokumen		
						5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	0 Orang		
								Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai e-Lapkin Persentase Penurunan ASN yang mendapat Hukuman Disiplin	91 Persen 0.8 Persen	5.03.02.2.04.01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		
							5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		
							5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan		
							5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15 Orang		
							5.03.02.2.04.05 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang		
							5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan dan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai dan atau Islah (Rujuk Kembali) yang diterbitkan	0 Orang 10 Orang 24 Rekomendasi		
							5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9 Laporan		
							5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	10 Dokumen		
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>											
	<b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Indeks Profesionalitas Aparatur	55,25 Persen	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Persen	5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	11 Persen	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan			
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>											
	<b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset	100 %	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi	1 Dok	5.05.02.2.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
			5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian yang dilakukan sendiri Bapelitbang umlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	0 Penelitian 5 Penelitian	5.05.02.2.02.05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
			5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Riset Internal dan Eksternal yang diinventarisasi umlah Penelitian bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Lainnya	2 Penelitian 2 Penelitian	5.05.02.2.03.12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
						5.05.02.2.03.13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
			5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah Yang dimanfaatkan	40 Skor	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>											
	<b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Gaji dan Tunjangan Pegawai Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 % 100 %	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keikutsertaan APIP dalam Peningkatan Kompetensi	39 orang	6.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	34 Orang	Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	Kota Bukittinggi		
			6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	100 %	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
	<b>6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	29 %	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	100 %	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Laporan	Kota Bukittinggi	
							6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99 Laporan	Kota Bukittinggi	
							6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan			Target Capaian
						6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	Kota Bukittinggi		
						6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	Kota Bukittinggi		
						6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	Kota Bukittinggi		
			6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	100 %	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Kota Bukittinggi		
						6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	Kota Bukittinggi		
	<b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100 %	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	100 %	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	28 perangkat daerah	Kota Bukittinggi	
						6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah			
						6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	Kota Bukittinggi		
						6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	Kota Bukittinggi		
	<b>7.01 KECAMATAN</b>										

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	ilai SAKIP SKPD nilai saki Nilai SAKIP SKPD	BB A - A	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah  Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	80 %  84 %	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Dokumen Renstra Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah  Persentase tertib administrasi keuangan Persentase Tertib Administrasi Keuangan	84 %  1 Tahun 100 %	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan 83 Orang/bulan 89 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100 % 100 %	7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	1 Dokumen 1 Laporan 1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84 % 100 % 100 %	7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan sapsras disiplin pegawai	8 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Pakaian Dinas & Atribut ASN	0 Paket 85 Paket 80 Stel 100 Orang	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bahan cetak jumlah penggandaan yang tersedia 3 Jenis Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 % Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 100 % Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %Q		7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	3 Jenis	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
								Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		
								Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	26 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		
								Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7000 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8820 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11729 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13020 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	7 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	8375 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	11768 Paket			
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia yang Disediakan	34731 Paket			
					7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Bukittinggi		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang			



No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor yang dibangun Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 gedung 4 Unit	Kota Bukittinggi	
			7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %		7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jukah rekening tagihan air Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan jumlah rekening tagihan listrik Jumlah rekening tagihan telepon jumlah tagihan rekening internet	9 rekening 1 Tahun 3 Laporan 4 Laporan 12 Laporan 9 rekening 2 rekening 9 rekening	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
			7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 %	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit			
							jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	35 unit			
						7.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit			
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan			
						7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Alat kebersihan	3 Jenis		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
						alat kebersihan kantor yang terdida	20 item				
						alat kebersihan kantor yang tersedia	20 item				
						alat kebersihan yang tersedia	20 item				
						jasa tenaga kebersihan	1 orang				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit				
						Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit				
						retribusi keberihan yang dibayarkan	12 bulan				
						retribusi kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan				
						retribusi kebersihan yang dibayarkan	12 bulan				
						Retribusi sampah	1 Tahun				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	78 -	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	82 %	7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	berita acara musrenbang	1 laporan	Kota Bukittinggi	
Indeks Keamanan pelayanan kecamatan		78 0	Persentase Kegiatan Dengan Capaian Minimal 80%		78 %	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi		1 Laporan			
Indeks Keamanan pelayanan kecamatan		80	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		3 Dokumen	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan			
Indeks Keamanan pelayanan kecamatan		80 0	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu		100 %	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		2 Laporan			
Indeks Keamanan Pelayanan Kecamatan		82 %				MUSRENBANG Kecamatan		1 Kali			
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		78 0				Rakor		4 Kali			
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		78 -									
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		78 0									
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		80									
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		80 0									
Indeks Kenyamanan Pelayanan Kecamatan		82 %									
Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan		82 %									
Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan		80									
Indeks ketepatan waktu pelayanan kecamatan		80 0									
Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan		78 -									
Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan		78 0									
Indeks Ketepatan Waktu Pelayanan Kecamatan		82 %									
Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan		78 -									

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen		Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen			
							Laporan Kegiatan	3 laporan			
			7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan pelayanan tepat waktu	8 Jenis	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	jasa tenaga administrasi	2 orang		Kota Bukittinggi	
				Persentase pelaksanaan pelayanan tepat Waktu	85 %		Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 Laporan			
				Persentase Pelaksanaan Pelayanan Tepat Waktu	75 %		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	0 Laporan			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan			
							laporan paten sesuai SOP	12 bulan			
						7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan		Kota Bukittinggi	
							laporan pendataan	1 laporan			
							Pendataan IUMK	7 Kelurahan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	0Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	15 %	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berita Acara Hasil Musrenbang Kecamatan	1 berita acara	Kota Bukittinggi	
		persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	23 %		Berita Acara Hasil Rembuk Warga	1 berita acara		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	21 %		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	25 %		berita acara musrenbang	1 berita acara		
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	21 %		Persentase peningkatan swadaya masyarakat	55 %		Berita Acara Musrenbang dan Berita Acara Rembug Warga	2 Berita Acara		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %		Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	100 %		Musrenbang Kelurahan	1 Kali		
							7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	Kota Bukittinggi	
								Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Kelurahan		
								sarana dan prasarana yang dibangun dan dipelihara	1 Kelurahan		
								sarana prasarana yang dibangun dan dipelihara	1 kelurahan		
							7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan	2 Kegiatan	Kota Bukittinggi	
							7.01.03.2.02.04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kota Bukittinggi	
								Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan	2 Laporan		
								laporan pembinaan	1 laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase program kerja yang dilaksanakan Persentase program kerja yang dilaksanakan Persentase program kerja yang dilaksanakan Persentase Program Kerja yang Dilaksanakan	23 % 85 % 100 % 75 %	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Honor RT, RW, LPM, Kader Posyandu dan Poskeskel Honor RT, RW, LPM. Kader Posyandu dan Poskeskel laporan pembinaan Laporan pembinaan Laporan pembinaan Laporan Pembinaan Laporan Pembinaan laporan PKK laporan PKK Laporan Pkk Laporan PKK Laporan PKK Laporan PKK Laporan PKK Pembinaan LPMK Pembinaan PKK	12 Bulan 12 Bulan 1 laporan 1 laporan 1 LAPORAN 1 laporan 1 Laporan 1 laporan 1 LAPORAN 1 laporan 1 laporan 1 LAPORAN 1 laporan 1 Laporan 4 Kali 4 Kali	Kota Bukittinggi		
						7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna laporan fasilitasi	0 Laporan 1 Laporan 1 laporan	Kota Bukittinggi		
	<b>7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Penegakan Perda	100 % 100 % 100 %	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah tindak lanjut penyelesaian kasus penegakan perda	6 Kali 4 Kasus 6 Kali	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan 4 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				7.01.04.7.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumah Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	4 kasus	7.01.04.7.03.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jasa tenaga administrasi Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan laporan monitoring laporan pembinaan	2 orang 1 Laporan 1 laporan 1 laporan	Kota Bukittinggi	
	<b>7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Indeks keamanan pelayanan kecamatan Indeks kenyamanan pelayanan kecamatan	78 0 78 0	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kegiatan dengan capaian minimal 80%	81 %	7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Koordinasi FORKOPINCAM laporan koordinasi	0 Dokumen 1 Dokumen 4 Kali 1 laporan	Kota Bukittinggi	
	<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>										
	<b>8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai SAKIP SKPD	A	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100 %	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100 %	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	8.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
				8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	100 %	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	
							8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				Ket.	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Sub Kegiatan
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
						8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penunjang Urusan SKPD yang dilaksanakan	100 %	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	80 %	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
						8.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kab/Kota Kota Bukittinggi		
	<b>8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Jumlah Konflik Sosial di Bukittinggi	8 KASUS	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kasus Penyimpangan Ideologi Negara	0 kasus	8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang	Kota Bukittinggi	



No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	140 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	2 KASUS	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang akuntabel Persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Persentase partisipasi masyarakat pada Pemilu / Pilkada di Kota Bukittinggi Persentase pengurus perempuan di Partai Politik	8 parpol 8 % 8 parpol 20 %	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	Kota Bukittinggi	
							8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6 Laporan	Kota Bukittinggi	
	<b>8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	JUMLAH KONFLIK POLITIK DI KOTA BUKITTINGGI	2 KASUS	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai AD/ART dan mengelola organisasinya sesuai AD/ART tersebut	85 Organisasi	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Kota Bukittinggi	
							8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Kota Bukittinggi	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Ket.
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	<b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	8 KASUS	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kasus Narkoba Jumlah Kasus SARA	0 kasus 0 kasus	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang	Kota Bukittinggi	
							8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	Kota Bukittinggi	
	<b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI BUKITTINGGI	8 KASUS	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang terdeteksi secara dini	3 kasus	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	Kota Bukittinggi	
							8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	Kota Bukittinggi	

## **BAB IV**

### **PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Belanja daerah yang dimuat dalam PPAS Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 ini adalah sebesar Rp910.319.273.000,00 Alokasi belanja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2023 tersebut dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp746.226.097.498,00; Belanja Modal sebesar Rp146.059.455.851,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp10.533.720.000,00.

Selanjutnya untuk struktur belanja APBD Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri atas:

1. Belanja operasi yang terbagi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial;
2. Belanja modal;
3. Belanja subsidi
4. Belanja tidak terduga; dan
5. Belanja transfer yang terbagi dua yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan

#### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Plafon anggaran sementara tahun 2023 berdasarkan Urusan Pemerintahan dianggarkan untuk melaksanakan 6 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 17 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 5 urusan pilihan. Plafon terbesar pada tahun 2023 dianggarkan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi dalam rangka mendukung prioritas pembangunan di bidang pendidikan, guna peningkatan pelayanan dasar serta mendukung potensi unggulan kota. Selanjutnya diikuti oleh Dinas Kesehatan guna peningkatan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat.

Rincian plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>154.502.571.227</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>154.502.571.227</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>152.962.941.983</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>106.988.865.942</b>	
<b>1.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>56.889.600</b>	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.889.600	
<b>1.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>105.532.742.702</b>	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	105.532.742.702	
<b>1.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>428.478.940</b>	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.610.200	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.283.700	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.655.000	
1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.116.000	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163.190.000	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	207.624.040	
<b>1.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.400.000</b>	
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.400.000	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.000.000	
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>822.354.700</b>	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	219.350.000	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	548.154.700	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>45.656.142.241</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>25.441.947.301</b>	
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	8.667.390.611	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.200.000	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	996.437.500	
1.01.02.2.01.15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	204.100.000	
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.003.924.100	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	671.730.000	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	164.465.000	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	93.758.900	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	547.671.550	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	12.093.114.140	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	193.439.500	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	773.716.000	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>12.534.763.980</b>	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.934.400.000	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	203.550.000	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	796.500.000	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	603.721.200	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	137.245.000	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	67.724.800	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	632.989.700	
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.744.053.080	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	203.725.100	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.210.855.100	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>7.022.339.760</b>	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	147.000.000	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.946.745.360	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	140.362.500	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.788.231.900	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>657.091.200</b>	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	50.000.000	
1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	515.681.700	
1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.399.800	
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	64.009.700	
<b>1.01.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>267.933.800</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>267.933.800</b>	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	67.367.100	
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	53.636.700	
1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	146.930.000	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>50.000.000</b>	
<b>1.01.04.2.01</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>50.000.000</b>	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.0001</b>	<b>SDN 01 Campago Ipuh</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.02</b>	<b>SDN 02 Campago Guguk Bulek</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.03</b>	<b>SDN 03 Pulai Anak Air</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.04</b>	<b>SDN 04 Garegeh</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.05</b>	<b>SDN 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>20.100.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.06</b>	<b>SDN 06 Pulai Anak Air</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.2.22.0.00.01.07</b>	<b>SDN 07 Kubu Gulai Bancah</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>20.100.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.08</b>	<b>SDN 08 Campago Ipuh</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.09</b>	<b>SDN 09 Manggis Ganting</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.10</b>	<b>SDN 10 Puhun Pintu Kabun</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.11</b>	<b>SDN 11 Campago Guguk Bulek</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.12</b>	<b>SDN 12 Puhun Pintu Kabun</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.13</b>	<b>SDN 13 Kubu Gulai Bancah</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.14</b>	<b>SDN 14 Tanjung Alam</b>	<b>4.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>4.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>4.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	4.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.15</b>	<b>SDN 15 Pulai Anak Air</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.16</b>	<b>SDN 16 Campago Ipuh</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.17</b>	<b>SDN 17 Manggis Ganting</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.18</b>	<b>SDN 18 Campago Guguk Bulek</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.19</b>	<b>SDN 01 Benteng Pasar Atas</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>40.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.20</b>	<b>SDN 02 Percontohan Kayu Kubu</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>40.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.21</b>	<b>SDN 03 Pakan Kurai</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.22</b>	<b>SDN 04 Bukit Apit Puhun</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.23</b>	<b>SDN 05 Tarok Dipo</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.24</b>	<b>SDN 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.25</b>	<b>SDN 07 Teladan Bukit Cangang</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.26</b>	<b>SDN 08 Tarok Dipo</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.27</b>	<b>SDN 10 Aur Tajungkang Tengah Sawah</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.28</b>	<b>SDN 11 Bukit Apit Puhun</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.29</b>	<b>SDN 12 Bukit Cangang</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.30</b>	<b>SDN 13 Bukit Apit Puhun</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.31</b>	<b>SDN 14 Aur Tajungkang Tengah Sawah</b>	<b>31.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>31.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>31.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	31.500.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.32	<b>SDN 16 Tarok Dipo</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.33	<b>SDN 17 Pakan Kurai</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.34	<b>SDN 18 Tarok Dipo</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
1.01.2.22.0.00.01.35	<b>SDN 19 Aur Tajungkang Tengah Sawah</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
1.01.2.22.0.00.01.36	<b>SDN 01 Ladang Cakiah</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
1.01.2.22.0.00.01.37	<b>SDN 02 Aur Kuning</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.38	<b>SDN 03 Pakan Labuah</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.39	<b>SDN 04 Birugo</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.02.2.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	
1.01.2.22.0.00.01.40	<b>SDN 05 Birugo</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.41</b>	<b>SDN 06 Parit Antang</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.42</b>	<b>SDN 07 Belakang Balok</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.43</b>	<b>SDN 08 Kubu Tanjung</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.44</b>	<b>SDN 09 Belakang Balok</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>20.100.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>20.100.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	20.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.45</b>	<b>SDN 10 Sapiran</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>27.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>27.000.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	27.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.46</b>	<b>SDN 11 Aur Kuning</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>13.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>13.500.000</b>	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	13.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.48</b>	<b>SMPN 1</b>	<b>49.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>49.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>49.500.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.49</b>	<b>SMPN 2</b>	<b>67.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>67.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>67.500.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	67.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.50</b>	<b>SMPN 3</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>40.500.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>40.500.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	40.500.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.51</b>	<b>SMPN 4</b>	<b>63.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>63.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>63.000.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	63.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.52</b>	<b>SMPN 5</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>45.000.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>45.000.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	45.000.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.53</b>	<b>SMPN 6</b>	<b>42.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>42.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>42.600.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42.600.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.54</b>	<b>SMPN 7</b>	<b>41.100.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>41.100.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>41.100.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	41.100.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.55</b>	<b>SMPN 8</b>	<b>33.600.000</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>33.600.000</b>	
<b>1.01.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>33.600.000</b>	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	33.600.000	
<b>1.01.2.22.0.00.01.56</b>	<b>UPTD TK NEGERI PEMBINA</b>	<b>96.699.804</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>96.699.804</b>	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>96.699.804</b>	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	96.699.804	
<b>1.01.2.22.0.00.01.57</b>	<b>UPTD TK NEGERI 1</b>	<b>85.921.540</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>85.921.540</b>	
<b>1.01.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>85.921.540</b>	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	85.921.540	
<b>1.01.2.22.0.00.01.58</b>	<b>SPNF SKB Kota Bukittinggi</b>	<b>99.407.900</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>99.407.900</b>	
<b>1.01.02.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>99.407.900</b>	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	99.407.900	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>96.053.728.031</b>	
<b>1.02.1.02.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>96.053.728.031</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.01</b>	<b>UPTD Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad</b>	<b>1.170.943.860</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>800.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>800.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>370.943.860</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>370.943.860</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	370.943.860	
<b>1.02.0.00.0.00.01.02</b>	<b>UPTD Puskesmas Guguk Panjang</b>	<b>1.098.543.250</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>850.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>850.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	850.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>248.543.250</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>248.543.250</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	248.543.250	
<b>1.02.0.00.0.00.01.03</b>	<b>UPTD Puskesmas Nilam Sari</b>	<b>599.603.580</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>379.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>379.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	379.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>220.603.580</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>220.603.580</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	220.603.580	
<b>1.02.0.00.0.00.01.04</b>	<b>UPTD Puskesmas Mandiangin</b>	<b>1.088.843.030</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>723.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>723.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	723.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>365.843.030</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>365.843.030</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	365.843.030	
<b>1.02.0.00.0.00.01.05</b>	<b>UPTD Puskesmas Gulai Bancah</b>	<b>547.787.010</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>300.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>300.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	300.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>247.787.010</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>247.787.010</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	247.787.010	
<b>1.02.0.00.0.00.01.06</b>	<b>UPTD Puskesmas Tigo Baleh</b>	<b>1.004.949.490</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>600.000.000</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>600.000.000</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	600.000.000	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>404.949.490</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>404.949.490</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	404.949.490	
<b>1.02.0.00.0.00.01.07</b>	<b>UPTD Puskesmas Plus Mandiangin</b>	<b>550.963.126</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>259.645.200</b>	
<b>1.02.01.2.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>259.645.200</b>	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	259.645.200	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>291.317.926</b>	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>291.317.926</b>	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	291.317.926	
<b>1.02.0.00.0.00.01.08</b>	<b>UPTD Instalasi Farmasi</b>	<b>779.906.178</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>779.906.178</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>512.325.700</b>	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	290.759.800	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	221.565.900	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>267.580.478</b>	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	267.580.478	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.09	UPTD Laboratorium Kesehatan	703.280.200	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	703.280.200	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	703.280.200	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	703.280.200	
1.02.0.00.0.00.01.10	Rumah Sakit Umum Daerah	28.349.256.760	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	11.000.000.000	
1.02.01.2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	11.000.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	11.000.000.000	
1.02.02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	17.349.256.760	
1.02.02.2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	17.349.256.760	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	17.349.256.760	
1.02.1.02.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	60.159.651.547	
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	42.235.241.199	
1.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	44.481.470	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.481.470	
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	40.522.621.801	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40.522.621.801	
1.02.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	213.982.100	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.913.700	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.288.500	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.619.900	
1.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.692.000	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.468.000	
1.02.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	41.574.600	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	41.574.600	
1.02.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	302.350.000	
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.250.000	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.100.000	
1.02.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.110.231.228	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	320.573.608	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.060.000	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	712.407.620	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>17.151.631.838</b>	
<b>1.02.02.2.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.085.680.000</b>	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	7.537.500.000	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	511.250.000	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	36.930.000	
<b>1.02.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.509.169.698</b>	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	97.060.000	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	125.982.070	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90.601.600	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	89.350.500	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	52.867.700	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	61.618.800	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	97.060.000	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	81.083.500	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	72.894.900	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	41.927.700	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	61.250.900	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	462.890.078	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	373.194.300	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	49.999.700	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	209.248.970	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24.985.200	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	129.443.670	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	17.319.800	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	527.418.000	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	4.700.000	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.261.570	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	5.217.030.800	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	383.985.640	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	19.548.500	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	29.996.900	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	9.999.800	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	81.449.100	
<b>1.02.02.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>44.580.600</b>	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	14.970.600	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	29.610.000	
<b>1.02.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>512.201.540</b>	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.992.800	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	494.208.740	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>242.932.010</b>	
<b>1.02.03.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.130.000</b>	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7.130.000	
<b>1.02.03.2.02</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>143.152.010</b>	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	143.152.010	
<b>1.02.03.2.03</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.650.000</b>	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.650.000	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>218.259.300</b>	
<b>1.02.04.2.01</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>71.299.300</b>	
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	34.650.100	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	36.649.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.02.04.2.03</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>55.980.000</b>	
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	55.980.000	
<b>1.02.04.2.04</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>45.000.000</b>	
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	45.000.000	
<b>1.02.04.2.06</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	<b>45.980.000</b>	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	45.980.000	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>311.587.200</b>	
<b>1.02.05.2.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>84.104.100</b>	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	84.104.100	
<b>1.02.05.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>136.906.700</b>	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	136.906.700	
<b>1.02.05.2.03</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.576.400</b>	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	90.576.400	
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	<b>64.500.919.708</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>64.500.919.708</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.01</b>	<b>UPTD Penerangan Fasilitas Umum</b>	<b>3.253.300</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.253.300</b>	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>3.253.300</b>	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.879.500	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	373.800	
<b>1.03.0.00.0.00.01.02</b>	<b>UPTD Perlengkapan dan Peralatan</b>	<b>1.016.442.750</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.016.442.750</b>	
<b>1.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4.020.500</b>	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.020.500	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.247.400</b>	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.479.700	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	767.700	
<b>1.03.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>153.550.000</b>	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.550.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>853.624.850</b>	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	853.624.850	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>63.481.223.658</b>	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11.893.944.001</b>	
<b>1.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.429.100</b>	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.429.100	
<b>1.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.231.571.101</b>	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.204.380.901	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.190.200	
<b>1.03.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>440.000.000</b>	
1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	440.000.000	
<b>1.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.531.800</b>	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.174.700	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.977.600	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.699.500	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.180.000	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.668.000	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.832.000	
<b>1.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.110.000</b>	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.400.000	
<b>1.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>713.302.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	257.000.000	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.660.000	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.642.000	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>7.490.556.017</b>	
<b>1.03.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>125.414.000</b>	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	125.414.000	
<b>1.03.02.2.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7.365.142.017</b>	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.952.000.000	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.372.549.900	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	859.431.165	
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	181.160.952	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>445.888.600</b>	
<b>1.03.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>445.888.600</b>	
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	445.888.600	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>213.291.400</b>	
<b>1.03.05.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>213.291.400</b>	
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	213.291.400	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>8.688.828.840</b>	
<b>1.03.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.688.828.840</b>	
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	508.054.100	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	466.515.000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	6.726.313.900	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	987.945.840	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>29.336.057.650</b>	
<b>1.03.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>29.336.057.650</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	332.103.800	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	28.941.455.000	
1.03.08.2.01.04	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	54.425.100	
1.03.08.2.01.09	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	8.073.750	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>2.355.668.609</b>	
<b>1.03.10.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.355.668.609</b>	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	90.050.000	
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	657.560.100	
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.085.178.689	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	260.000.000	
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	262.879.820	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>46.951.750</b>	
<b>1.03.11.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>46.951.750</b>	
1.03.11.2.02.06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	14.238.200	
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	12.599.900	
1.03.11.2.02.10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	20.113.650	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>3.010.036.791</b>	
<b>1.03.12.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>2.069.337.300</b>	
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	2.069.337.300	
<b>1.03.12.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>428.673.511</b>	
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	428.673.511	
<b>1.03.12.2.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>512.025.980</b>	
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	258.055.080	
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	253.970.900	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>24.698.865.027</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>24.698.865.027</b>	
<b>1.04.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>	<b>24.698.865.027</b>	
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.844.527.905</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.740.000</b>	
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.740.000	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.270.716.701</b>	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.270.716.701	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>289.914.700</b>	
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.412.400	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.628.100	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.826.200	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.640.000	
1.04.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.998.000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.410.000	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>18.920.000</b>	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.920.000	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
<b>1.04.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>228.236.504</b>	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	137.750.000	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.790.000	
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.506.504	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.487.670.608</b>	
<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>10.391.100</b>	
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	10.391.100	
<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>1.477.279.508</b>	
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	361.994.100	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.115.285.408	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>2.153.323.000</b>	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>53.600.300</b>	
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	53.600.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>2.099.722.700</b>	
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	1.822.745.400	
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	276.977.300	
<b>1.04.04</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>4.124.241.300</b>	
<b>1.04.04.2.01</b>	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.124.241.300</b>	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.124.241.300	
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>12.089.102.214</b>	
<b>1.04.05.2.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>12.089.102.214</b>	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	843.580.913	
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	11.147.980.460	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	97.540.841	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>40.179.734.032</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>26.153.838.941</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>	<b>26.153.838.941</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.405.306.881</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.590.000</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.590.000	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.417.795.081</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.417.795.081	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>179.216.200</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.834.700	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.033.300	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.232.200	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.996.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.120.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>124.160.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.680.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.800.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.680.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>664.545.600</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	310.790.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.340.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.225.600	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>18.748.532.060</b>	
<b>1.05.02.2.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.549.646.560</b>	
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.761.123.900	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	12.965.579.260	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.593.630.700	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.229.312.700	
<b>1.05.02.2.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	<b>981.985.500</b>	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	259.266.000	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	380.271.200	
1.05.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	342.448.300	
<b>1.05.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>	<b>216.900.000</b>	
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	216.900.000	
<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>6.171.688.280</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.03.00</b>	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>	<b>6.171.688.280</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.557.978.350</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.385.800</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.385.800	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.928.711.450</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.928.711.450	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.462.400</b>	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51.462.400	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>196.984.900</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.014.300	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.436.600	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.888.000	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.360.000	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.286.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13.200.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.600.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>355.233.800</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.810.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.210.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.213.800	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>3.613.709.930</b>	
<b>1.05.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>194.458.500</b>	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	138.463.800	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	55.994.700	
<b>1.05.03.2.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>3.409.251.430</b>	
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	79.136.600	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	334.472.100	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.290.441.580	
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	133.402.100	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	481.550.900	
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	52.042.950	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.038.205.200	
<b>1.05.03.2.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>10.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	10.000.000	
<b>1.05.1.05.1.05.01.0000</b>	<b>Dinas Kebakaran</b>	<b>7.854.206.811</b>	
<b>1.05.1.05.1.05.01.0000</b>	<b>Dinas Kebakaran</b>	<b>7.854.206.811</b>	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.564.002.961</b>	
<b>1.05.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.069.600</b>	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.069.600	
<b>1.05.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.387.005.161</b>	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.387.005.161	
<b>1.05.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>76.877.800</b>	
1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36.377.800	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	40.500.000	
<b>1.05.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>113.245.400</b>	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.584.800	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.119.800	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.889.900	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.910.900	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.740.000	
<b>1.05.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.150.000</b>	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.100.000	
<b>1.05.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>909.655.000</b>	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	653.160.000	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.905.000	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.400.000	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>2.290.203.850</b>	
<b>1.05.04.2.01</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.152.001.050</b>	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.106.600	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.830.958.450	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	79.906.100	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	50.747.900	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	43.579.900	
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	121.702.100	
<b>1.05.04.2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>26.985.250</b>	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	26.985.250	
<b>1.05.04.2.03</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>19.112.800</b>	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	19.112.800	
<b>1.05.04.2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>92.104.750</b>	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	43.786.650	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	48.318.100	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>19.320.127.311</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>19.320.127.311</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Sosial</b>	<b>19.320.127.311</b>	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.344.438.772</b>	
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.033.400</b>	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.033.400	
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.783.610.368</b>	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.759.543.568	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.066.800	
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>171.936.600</b>	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.820.000	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.968.900	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.707.700	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.440.000	
<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.400.000</b>	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.400.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.458.404</b>	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.111.804	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.810.000	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.536.600	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>2.116.634.900</b>	
<b>1.06.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.116.634.900</b>	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.202.597.600	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	54.735.900	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	125.890.700	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	670.964.700	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	62.446.000	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>3.074.761.494</b>	
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>2.377.026.644</b>	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	98.264.800	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	195.014.300	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1.559.906.200	
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	59.928.000	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	294.026.052	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	169.887.292	
<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>697.734.850</b>	
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39.141.400	
1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	57.681.600	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	600.911.850	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>9.414.230.307</b>	
<b>1.06.05.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>167.209.023</b>	
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	81.825.423	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	85.383.600	
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>9.247.021.284</b>	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	654.833.200	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.166.405.584	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	4.425.782.500	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>984.707.472</b>	
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>598.274.900</b>	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	142.125.000	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	71.362.000	
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	183.260.000	
1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	201.527.900	
<b>1.06.06.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>386.432.572</b>	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	96.506.600	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	289.925.972	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>385.354.366</b>	
<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>385.354.366</b>	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	242.417.944	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	142.936.422	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>1.720.652.600</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>1.720.652.600</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>1.720.652.600</b>	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.677.882.700</b>	
<b>2.07.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>1.677.882.700</b>	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.677.882.700	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>21.720.800</b>	
<b>2.07.04.2.01</b>	<b>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.720.800</b>	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	21.720.800	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>21.049.100</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.049.100</b>	
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.545.500	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.503.600	
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>10.287.319.645</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>10.287.319.645</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>10.287.319.645</b>	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.882.628.755</b>	
<b>2.08.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.739.800</b>	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.739.800	
<b>2.08.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.995.516.905</b>	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.995.516.905	
<b>2.08.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>176.383.700</b>	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.003.900	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.587.400	
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.810.400	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.190.700	
2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.375.400	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.415.900	
<b>2.08.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.456.400</b>	
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	14.456.400	
<b>2.08.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.592.510</b>	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.340.000	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.642.000	
2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.705.000	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.905.510	
<b>2.08.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>519.939.440</b>	
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.741.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	259.019.170	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.179.270	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>1.017.293.800</b>	
<b>2.08.02.2.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>61.492.700</b>	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	61.492.700	
<b>2.08.02.2.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>955.801.100</b>	
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	435.801.100	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	520.000.000	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>60.326.670</b>	
<b>2.08.03.2.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>60.326.670</b>	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	60.326.670	
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>1.481.251.978</b>	
<b>2.08.04.2.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.481.251.978</b>	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	752.490.270	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	728.761.708	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>14.867.800</b>	
<b>2.08.05.2.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.867.800</b>	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.867.800	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>519.244.042</b>	
<b>2.08.06.2.01</b>	<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>407.064.720</b>	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	193.840.820	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	213.223.900	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.08.06.2.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>112.179.322</b>	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.179.322	
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>311.706.600</b>	
<b>2.08.07.2.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>88.191.800</b>	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	88.191.800	
<b>2.08.07.2.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>223.514.800</b>	
2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92.210.600	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	131.304.200	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>10.725.116.231</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>10.725.116.231</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>10.725.116.231</b>	
<b>2.09.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.224.776.631</b>	
<b>2.09.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.465.000</b>	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.465.000	
<b>2.09.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.115.740.111</b>	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.115.740.111	
<b>2.09.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>281.128.100</b>	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.090.200	
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.858.300	
2.09.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.090.400	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.125.200	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.964.000	
<b>2.09.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.290.000</b>	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.890.000	
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	
<b>2.09.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>751.153.420</b>	
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	314.973.920	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.923.000	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.256.500	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>458.629.600</b>	
<b>2.09.03.2.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>15.692.400</b>	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	15.692.400	
<b>2.09.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>23.825.000</b>	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23.825.000	
<b>2.09.03.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>419.112.200</b>	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	402.812.300	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	16.299.900	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>23.120.000</b>	
<b>2.09.04.2.01</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>23.120.000</b>	
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	23.120.000	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>18.590.000</b>	
<b>2.09.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>18.590.000</b>	
2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	18.590.000	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>695.588.550</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>695.588.550</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>695.588.550</b>	
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>36.771.900</b>	
<b>2.10.04.2.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.771.900</b>	
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.771.900	
<b>2.10.05</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>21.014.000</b>	
<b>2.10.05.2.01</b>	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.014.000</b>	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	21.014.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.10.07</b>	<b>PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT</b>	<b>48.297.800</b>	
<b>2.10.07.2.01</b>	<b>Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>48.297.800</b>	
2.10.07.2.01.03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	48.297.800	
<b>2.10.09</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>255.837.940</b>	
<b>2.10.09.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	<b>255.837.940</b>	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	255.837.940	
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>333.666.910</b>	
<b>2.10.10.2.01</b>	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>333.666.910</b>	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	110.057.100	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	223.609.810	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>38.686.506.753</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>38.686.506.753</b>	
<b>2.11.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>38.686.506.753</b>	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>21.280.153.339</b>	
<b>2.11.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.740.000</b>	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.740.000	
<b>2.11.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.052.039.789</b>	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.052.039.789	
<b>2.11.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>297.735.000</b>	
2.11.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	297.735.000	
<b>2.11.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>170.722.000</b>	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.270.000	
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.845.000	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.140.000	
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.000.000	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.467.000	
<b>2.11.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.720.000</b>	
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.620.000	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.100.000	
<b>2.11.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.611.196.550</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.099.993.150	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.995.000	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	442.018.400	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>730.863.600</b>	
<b>2.11.02.2.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>332.777.600</b>	
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	188.091.400	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	144.686.200	
<b>2.11.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>398.086.000</b>	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	398.086.000	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>234.942.840</b>	
<b>2.11.03.2.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>234.942.840</b>	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	91.503.800	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	68.815.000	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	74.624.040	
<b>2.11.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>2.147.279.650</b>	
<b>2.11.04.2.01</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>2.147.279.650</b>	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.147.279.650	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>16.500.000</b>	
<b>2.11.05.2.02</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.500.000</b>	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	16.500.000	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>73.713.300</b>	
<b>2.11.06.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>73.713.300</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	59.999.200	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.714.100	
<b>2.11.07</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>60.495.200</b>	
<b>2.11.07.2.01</b>	<b>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>60.495.200</b>	
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	60.495.200	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>237.980.850</b>	
<b>2.11.08.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>237.980.850</b>	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	109.356.850	
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	128.624.000	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>185.425.900</b>	
<b>2.11.09.2.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>185.425.900</b>	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185.425.900	
<b>2.11.10</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>18.998.600</b>	
<b>2.11.10.2.01</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>18.998.600</b>	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	18.998.600	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>13.700.153.474</b>	
<b>2.11.11.2.01</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>13.700.153.474</b>	
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	965.626.965	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	8.464.191.909	
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.270.334.600	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>7.650.647.975</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.650.647.975	
2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.650.647.975	
2.12.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.669.143.051	
2.12.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	20.110.800	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.110.800	
2.12.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	4.728.612.918	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.728.612.918	
2.12.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	137.388.600	
2.12.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	137.388.600	
2.12.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	156.296.000	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.681.700	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.013.700	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.100.600	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.100.000	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.400.000	
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	46.200.400	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	25.257.100	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.943.300	
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	122.774.000	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.560.000	
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.814.000	
2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	457.760.333	
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.350.000	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.220.333	
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	679.654.830	
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	646.844.630	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	225.365.800	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	421.478.830	
2.12.02.2.02	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	32.810.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	32.810.200	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>460.623.850</b>	
<b>2.12.03.2.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>460.623.850</b>	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	217.929.300	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	242.694.550	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>765.137.544</b>	
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>192.929.850</b>	
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	103.219.400	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	89.710.450	
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>572.207.694</b>	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	372.289.000	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	199.918.694	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>76.088.700</b>	
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>76.088.700</b>	
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	34.735.000	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	41.353.700	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>2.458.335.140</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>2.458.335.140</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>2.458.335.140</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>160.653.900</b>	
<b>2.14.02.2.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>94.179.500</b>	
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	19.529.800	
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	62.649.900	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	11.999.800	
<b>2.14.02.2.02</b>	<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>66.474.400</b>	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	13.824.700	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	52.649.700	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>1.187.198.780</b>	
<b>2.14.03.2.02</b>	<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>1.027.693.680</b>	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24.999.900	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.002.693.780	
<b>2.14.03.2.03</b>	<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>134.505.300</b>	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	134.505.300	
<b>2.14.03.2.04</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>24.999.800</b>	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	24.999.800	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.110.482.460</b>	
<b>2.14.04.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>410.479.660</b>	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	19.917.700	
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	49.999.300	
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	169.942.060	
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	120.618.600	
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	50.002.000	
<b>2.14.04.2.02</b>	<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>700.002.800</b>	
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	700.002.800	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>21.010.706.885</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>4.447.389.520</b>	
<b>1.03.0.00.0.00.01.01</b>	<b>UPTD Penerangan Fasilitas Umum</b>	<b>4.447.389.520</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>4.447.389.520</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>4.447.389.520</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.317.449.200	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.129.940.320	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>16.563.317.365</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Perhubungan</b>	<b>12.395.811.781</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.838.438.696</b>	
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.948.600</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.948.600	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.979.150.796</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.962.837.296	
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.313.500	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>95.050.000</b>	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	95.050.000	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>101.882.100</b>	
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36.000.000	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	65.882.100	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>177.391.100</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.991.400	
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.362.700	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.399.500	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.846.400	
2.15.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.991.100	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.800.000	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>39.496.100</b>	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	39.496.100	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>82.020.000</b>	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.640.000	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.380.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>343.500.000</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.850.000	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.610.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>3.557.373.085</b>	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>388.941.800</b>	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	194.822.500	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	194.119.300	
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>2.804.974.880</b>	
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	117.212.000	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.664.189.580	
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	23.573.300	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>21.078.100</b>	
2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	21.078.100	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>204.951.000</b>	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	204.951.000	
<b>2.15.02.2.11</b>	<b>Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.004.700</b>	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.004.700	
<b>2.15.02.2.14</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>83.422.605</b>	
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	83.422.605	
<b>2.15.0.00.0.00.01.01</b>	<b>UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor</b>	<b>190.710.800</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>158.930.800</b>	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>37.250.800</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.338.000	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.859.000	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.053.800	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.200.000</b>	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.200.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>117.480.000</b>	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117.480.000	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>31.780.000</b>	
<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>31.780.000</b>	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	31.780.000	
<b>2.15.0.00.0.00.01.02</b>	<b>UPTD Terminal dan Parkir</b>	<b>3.976.794.784</b>	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.976.794.784</b>	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>615.000.000</b>	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	615.000.000	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>67.784.200</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.222.600	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.612.100	
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.949.500	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.000.000	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>199.100.000</b>	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	199.100.000	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.094.910.584</b>	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.094.910.584	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8.203.751.701</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.203.751.701</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.203.751.701</b>	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.621.265.511</b>	
<b>2.16.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.739.900</b>	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.739.900	
<b>2.16.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.223.424.611</b>	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.424.611	
<b>2.16.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>146.491.000</b>	
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	657.500	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.944.500	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.220.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.669.000	
<b>2.16.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>19.200.000</b>	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	
<b>2.16.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>195.410.000</b>	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.100.000	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.870.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.250.000	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.754.782.410</b>	
<b>2.16.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.754.782.410</b>	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	559.974.820	
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	711.245.640	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	194.557.150	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	39.903.900	
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	197.101.100	
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	51.999.800	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.827.703.780</b>	
<b>2.16.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.140.612.540</b>	
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.140.612.540	
<b>2.16.03.2.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>687.091.240</b>	
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	146.665.100	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	39.896.270	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	420.530.070	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	79.999.800	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>17.666.170.330</b>	
<b>2.17.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>	<b>17.666.170.330</b>	
<b>2.17.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>	<b>17.666.170.330</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.613.128.436</b>	
<b>2.17.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.540.440</b>	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.540.440	
<b>2.17.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.526.265.580</b>	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.463.134.240	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.131.340	
<b>2.17.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>249.994.600</b>	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.539.400	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.600.000	
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.520.600	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.166.600	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.896.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.272.000	
<b>2.17.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>241.008.510</b>	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82.684.510	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.800.000	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.524.000	
<b>2.17.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>540.319.306</b>	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.158.170	
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.900.000	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	340.261.136	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>29.705.900</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>29.705.900</b>	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	29.705.900	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>32.000.000</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>32.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	32.000.000	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>1.528.289.100</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.528.289.100</b>	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.528.289.100	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>1.299.999.800</b>	
<b>2.17.07.2.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>1.299.999.800</b>	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	800.000.000	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	499.999.800	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>5.163.047.094</b>	
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>5.163.047.094</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.163.047.094	
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>10.810.252.246</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>10.810.252.246</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>10.810.252.246</b>	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9.266.035.056</b>	
<b>2.18.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.838.800</b>	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.838.800	
<b>2.18.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.185.981.016</b>	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.185.981.016	
<b>2.18.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>269.681.700</b>	
2.18.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	269.681.700	
<b>2.18.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>316.836.000</b>	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.122.700	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.071.000	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.439.300	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.243.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.860.000	
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.100.000	
<b>2.18.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>831.040.000</b>	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.040.000	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	828.000.000	
<b>2.18.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>642.657.540</b>	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	173.900.000	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.524.000	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.043.540	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>187.612.400</b>	
<b>2.18.02.2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>187.612.400</b>	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	187.612.400	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>145.533.900</b>	
<b>2.18.03.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>145.533.900</b>	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	145.533.900	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.087.805.390</b>	
<b>2.18.04.2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>1.087.805.390</b>	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	875.937.090	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	104.450.400	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	107.417.900	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>103.858.800</b>	
<b>2.18.05.2.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>103.858.800</b>	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.858.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.18.06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>19.406.700</b>	
2.18.06.2.01	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19.406.700</b>	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	19.406.700	
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>12.112.323.728</b>	
3.26.2.19.0.00.01.0000	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>12.112.323.728</b>	
3.26.2.19.0.00.01.0000	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>12.112.323.728</b>	
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>1.578.522.800</b>	
2.19.02.2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>	<b>1.169.943.200</b>	
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	349.999.400	
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	74.473.400	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	745.470.400	
2.19.02.2.02	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>408.579.600</b>	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	408.579.600	
2.19.03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>10.033.004.428</b>	
2.19.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.843.452.600</b>	
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.753.599.100	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5.089.853.500	
2.19.03.2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.924.791.800</b>	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.924.791.800	
2.19.03.2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>1.264.760.028</b>	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	518.000.000	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	746.760.028	
2.19.04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>500.796.500</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>2.19.04.2.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>500.796.500</b>	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500.796.500	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>119.999.600</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>119.999.600</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>119.999.600</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>119.999.600</b>	
<b>2.20.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>119.999.600</b>	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	119.999.600	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>95.044.500</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>95.044.500</b>	
<b>2.16.2.21.2.20.01.0000</b>	<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	<b>95.044.500</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>95.044.500</b>	
<b>2.21.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>95.044.500</b>	
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.630.000	
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.414.500	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>1.961.978.508</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.961.978.508</b>	
<b>1.01.2.22.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</b>	<b>1.961.978.508</b>	
<b>2.22.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>429.011.200</b>	
<b>2.22.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>135.602.700</b>	
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	135.602.700	
<b>2.22.02.2.03</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>293.408.500</b>	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	293.408.500	
<b>2.22.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>631.625.000</b>	
<b>2.22.03.2.01</b>	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>631.625.000</b>	
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	631.625.000	
<b>2.22.05</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>215.660.100</b>	
<b>2.22.05.2.01</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>43.594.000</b>	
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	11.699.100	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	31.894.900	
<b>2.22.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>172.066.100</b>	
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	70.538.600	
2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	101.527.500	
<b>2.22.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>685.682.208</b>	
<b>2.22.06.2.01</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>685.682.208</b>	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	121.306.608	
2.22.06.2.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	496.622.100	
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	67.753.500	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>6.823.207.624</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>6.823.207.624</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.01.00</b>	<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</b>	<b>6.823.207.624</b>	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.567.539.532</b>	
<b>2.23.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.756.800</b>	
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.756.800	
<b>2.23.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.407.703.172</b>	
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.407.703.172	
<b>2.23.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>200.250.000</b>	
2.23.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.250.000	
<b>2.23.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>55.348.300</b>	
2.23.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55.348.300	
<b>2.23.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>175.714.700</b>	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.486.400	
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.826.500	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.475.800	
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.998.000	
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.928.000	
<b>2.23.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>225.758.300</b>	
2.23.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.800.000	
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.710.000	
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	152.848.300	
<b>2.23.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>489.008.260</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.118.060	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.700.200	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>1.205.817.092</b>	
<b>2.23.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>907.050.500</b>	
2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	98.424.800	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.999.600	
2.23.02.2.01.03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.736.600	
2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	61.000.000	
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.000.000	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	138.809.800	
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	284.996.000	
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	14.998.900	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.084.800	
<b>2.23.02.2.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>298.766.592</b>	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	54.999.200	
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	139.783.600	
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	103.983.792	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>49.851.000</b>	
<b>2.23.03.2.01</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.980.000</b>	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.999.000	
2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	19.981.000	
<b>2.23.03.2.02</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>23.871.000</b>	
2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	23.871.000	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>528.380.350</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	528.380.350	
2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	528.380.350	
2.24.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>370.748.650</b>	
2.24.02.2.01	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>88.096.250</b>	
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	52.473.600	
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	12.882.950	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	22.739.700	
2.24.02.2.02	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.152.400</b>	
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	90.152.400	
2.24.02.2.03	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>192.500.000</b>	
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	17.500.000	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000	
2.24.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>123.046.100</b>	
2.24.03.2.01	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>66.837.000</b>	
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	66.837.000	
2.24.03.2.02	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>	<b>56.209.100</b>	
2.24.03.2.02.01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	56.209.100	
2.24.04	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>34.585.600</b>	
2.24.04.2.01	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>34.585.600</b>	
2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	34.585.600	
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
3.25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>869.295.750</b>	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	869.295.750	
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Pangan	554.425.140	
3.25.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>434.999.200</b>	
3.25.04.2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>434.999.200</b>	
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.000	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	385.000.200	
3.25.06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>119.425.940</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.25.06.2.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>119.425.940</b>	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	119.425.940	
<b>3.27.2.09.3.25.01.03</b>	<b>UPTD Balai Benih Ikan Hias</b>	<b>314.870.610</b>	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.281.700</b>	
<b>3.25.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.281.700</b>	
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.281.700	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>299.588.910</b>	
<b>3.25.04.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>299.588.910</b>	
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.588.910	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>40.475.729.552</b>	
<b>3.26.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>40.475.729.552</b>	
<b>3.26.2.19.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>	<b>40.475.729.552</b>	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.374.873.754</b>	
<b>3.26.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.133.600</b>	
3.26.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.133.600	
<b>3.26.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.562.145.634</b>	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.562.145.634	
<b>3.26.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>125.565.900</b>	
3.26.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	125.565.900	
<b>3.26.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>238.099.600</b>	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.088.900	
3.26.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.669.100	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.891.600	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	202.450.000	
<b>3.26.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>817.660.000</b>	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.700.000	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	813.960.000	
<b>3.26.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>601.269.020</b>	
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.713.608	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.480.000	
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	186.845.412	
3.26.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.230.000	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>28.392.529.282</b>	
<b>3.26.02.2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>3.810.535.700</b>	
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	889.242.300	
3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2.921.293.400	
<b>3.26.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>14.684.985.628</b>	
3.26.02.2.02.03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.274.210.780	
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	8.183.474.848	
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	475.261.200	
3.26.02.2.02.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.752.038.800	
<b>3.26.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>9.897.007.954</b>	
3.26.02.2.03.02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	324.906.400	
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.517.293.000	
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.356.733.054	
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	698.075.500	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>1.635.298.650</b>	
<b>3.26.03.2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>1.635.298.650</b>	
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	744.350.650	
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	890.948.000	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>2.073.027.866</b>	
<b>3.26.05.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>2.073.027.866</b>	
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	237.303.400	
3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	182.440.500	
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1.460.204.566	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	193.079.400	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>11.550.569.532</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>11.550.569.532</b>	
<b>3.27.2.09.3.25.01.0000</b>	<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>	<b>10.988.320.848</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>2.032.261.104</b>	
<b>3.27.02.2.01</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>651.360.200</b>	
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	651.360.200	
<b>3.27.02.2.02</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1.338.086.604</b>	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	41.600.000	
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	489.798.400	
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	806.688.204	
<b>3.27.02.2.03</b>	<b>Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25.000.000</b>	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	25.000.000	
<b>3.27.02.2.05</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.814.300</b>	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	17.814.300	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>8.379.085.200</b>	
<b>3.27.03.2.01</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>17.650.000</b>	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	17.650.000	
<b>3.27.03.2.02</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>8.361.435.200</b>	
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.361.435.400	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	6.999.999.800	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>59.999.804</b>	
<b>3.27.04.2.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>59.999.804</b>	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	59.999.804	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>516.974.740</b>	
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>516.974.740</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	305.230.470	
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	211.744.270	
<b>3.27.2.09.3.25.01.01</b>	<b>UPTD Rumah Potong Hewan</b>	<b>306.703.440</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>65.720.000</b>	
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.640.000</b>	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.640.000	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>21.080.000</b>	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.080.000	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>240.983.440</b>	
<b>3.27.04.2.04</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>240.983.440</b>	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	240.983.440	
<b>3.27.2.09.3.25.01.02</b>	<b>UPTD Pusat Kesehatan Hewan</b>	<b>255.545.244</b>	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>28.581.800</b>	
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.528.300</b>	
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.528.300	
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.053.500</b>	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.053.500	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>226.963.444</b>	
<b>3.27.04.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>226.963.444</b>	
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	226.963.444	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>33.065.883.912</b>	
<b>2.17.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>	<b>33.065.883.912</b>	
<b>2.17.3.30.0.00.01.0000</b>	<b>Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan</b>	<b>32.589.303.000</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>14.896.900</b>	
<b>3.30.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>9.199.900</b>	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	9.199.900	
<b>3.30.02.2.03</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>5.697.000</b>	
3.30.02.2.03.02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5.697.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>3.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>30.630.393.990</b>	
<b>3.30.03.2.01</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>26.050.807.064</b>	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.226.129.500	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7.824.677.564	
<b>3.30.03.2.02</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>4.579.586.926</b>	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.568.802.136	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2.010.784.790	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>177.464.740</b>	
<b>3.30.04.2.01</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>38.619.400</b>	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	38.619.400	
<b>3.30.04.2.02</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>96.375.240</b>	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	56.775.640	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	39.599.600	
<b>3.30.04.2.03</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.470.100</b>	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	42.470.100	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>384.736.200</b>	
<b>3.30.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>384.736.200</b>	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	329.436.400	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	55.299.800	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>1.381.811.170</b>	
<b>3.30.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>1.381.811.170</b>	
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1.381.811.170	
<b>2.17.3.30.0.00.01.01</b>	<b>UPTD Kemetrolgian</b>	<b>476.580.912</b>	
<b>3.30.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>286.567.912</b>	
<b>3.30.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>99.452.600</b>	
3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.268.300	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.715.200	
3.30.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.235.300	
3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.233.800	
3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000	
<b>3.30.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>24.450.000</b>	
3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.450.000	
<b>3.30.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>162.665.312</b>	
3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	89.494.204	
3.30.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.171.108	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>190.013.000</b>	
<b>3.30.06.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>190.013.000</b>	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	171.214.700	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	18.798.300	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>1.588.323.584</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>1.588.323.584</b>	
<b>2.18.3.31.2.07.01.0000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>	<b>1.135.177.004</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>1.050.166.500</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>1.050.166.500</b>	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	342.736.800	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	707.429.700	
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>85.010.504</b>	
<b>3.31.04.2.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>85.010.504</b>	
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	85.010.504	
<b>2.18.3.31.2.07.02.01</b>	<b>UPTD Kerajinan Industri</b>	<b>453.146.580</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>453.146.580</b>	
<b>3.31.02.2.01</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>453.146.580</b>	
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	453.146.580	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>71.133.641.484</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>71.133.641.484</b>	
<b>4.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>	<b>71.133.641.484</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>38.709.159.798</b>	
<b>4.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.293.800</b>	
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.293.800	
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.638.094.000</b>	
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.617.701.000	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.930.000	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.463.000	
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.101.551.320</b>	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	76.121.100	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	835.529.200	
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.730.400	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	207.669.000	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	59.830.000	
4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.380.426.620	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.442.245.000	
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.133.035.600</b>	
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.986.100.400	
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	146.935.200	
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>397.520.000</b>	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.020.000	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.500.000	
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.595.991.130</b>	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.145.170	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.974.190.210	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	20.000.000	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.243.515.750	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.140.000	
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.331.619.968</b>	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	780.619.968	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	551.000.000	
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>8.218.761.270</b>	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	5.136.932.300	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.533.582.470	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	548.246.500	
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>375.574.000</b>	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	95.619.500	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	196.349.800	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	83.604.700	
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>3.897.718.710</b>	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolkan	2.898.799.300	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	127.073.100	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	871.846.310	
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>30.010.555.742</b>	
<b>4.01.02.2.01</b>	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>1.126.928.100</b>	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	186.857.100	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	745.020.000	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	195.051.000	
<b>4.01.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>28.004.595.360</b>	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.742.012.470	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	13.376.681.990	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	9.885.900.900	
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>772.282.282</b>	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	150.844.582	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	472.560.200	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	148.877.500	
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>106.750.000</b>	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	106.750.000	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.413.925.944</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.01.03.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>635.894.200</b>	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	89.590.900	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	272.435.700	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	104.863.800	
4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	169.003.800	
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>395.008.200</b>	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	58.255.100	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	146.619.700	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	190.133.400	
<b>4.01.03.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.222.404.944</b>	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	863.731.500	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	282.673.644	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75.999.800	
<b>4.01.03.2.04</b>	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>160.618.600</b>	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	56.748.200	
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	49.623.600	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	54.246.800	
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>46.397.800.871</b>	
<b>4.02.4.02.4.02.02.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>46.397.800.871</b>	
<b>4.02.4.02.4.02.02.0000</b>	<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>46.397.800.871</b>	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>20.188.830.493</b>	
<b>4.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.229.800</b>	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.229.800	
<b>4.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.975.204.407</b>	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.945.204.707	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	29.999.700	
<b>4.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>200.000.000</b>	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	
<b>4.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.500.000</b>	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14.500.000	
4.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	76.000.000	
<b>4.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.683.563.080</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.920.900	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.815.700	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.098.600	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.362.700	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	129.007.100	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	429.793.400	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	579.112.680	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.452.000	
<b>4.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>171.960.000</b>	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.460.000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.500.000	
<b>4.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.276.197.410</b>	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.090.000	
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	457.904.510	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.280.900	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.482.000	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.440.000	
<b>4.02.01.2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>12.221.058.206</b>	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	11.919.304.206	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	232.605.200	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	69.148.800	
<b>4.02.01.2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>548.117.590</b>	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	182.670.850	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	365.446.740	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>26.208.970.378</b>	
<b>4.02.02.2.01</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>4.317.810.916</b>	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	249.053.200	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.217.393.216	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	692.739.500	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	158.625.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>4.02.02.2.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.664.498.800</b>	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	528.828.700	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	523.170.500	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	528.501.300	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	532.104.800	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	71.893.600	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	479.999.900	
<b>4.02.02.2.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>5.962.502.190</b>	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.572.244.380	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.502.494.800	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.505.118.840	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.553.400	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	342.091.100	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	499.999.770	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	489.999.900	
<b>4.02.02.2.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>4.044.218.172</b>	
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.429.423.110	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	709.970.500	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	204.824.662	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	699.999.900	
<b>4.02.02.2.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>3.223.010.000</b>	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.305.316.400	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.917.693.600	
<b>4.02.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>505.774.500</b>	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	505.774.500	
<b>4.02.02.2.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>5.491.155.800</b>	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.310.000.000	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	759.033.900	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	422.121.900	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>7.247.971.184</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>7.247.971.184</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>7.247.971.184</b>	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.823.625.284</b>	
<b>5.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.230.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.230.000	
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.793.509.344</b>	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.793.509.344	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>483.168.400</b>	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.632.400	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.000.000	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.245.400	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.262.600	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.268.000	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	196.760.000	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.175.000</b>	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.375.000	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>450.542.540</b>	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.158.170	
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.950.000	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.434.370	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>842.790.300</b>	
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>679.082.000</b>	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	75.853.400	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	78.412.000	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	147.078.600	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	377.738.000	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>89.514.400</b>	
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	89.514.400	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>74.193.900</b>	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	74.193.900	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>581.555.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>246.240.500</b>	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.201.100	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	35.840.800	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	42.562.500	
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.636.100	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>140.735.100</b>	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.867.700	
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	68.971.900	
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	21.839.500	
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	18.056.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>194.580.000</b>	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	35.391.900	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	159.188.100	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>42.014.721.575</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Keuangan</b>	<b>42.014.721.575</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Keuangan</b>	<b>42.014.721.575</b>	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.530.510.905</b>	
<b>5.02.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.039.800</b>	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.039.800	
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.617.898.905</b>	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.617.898.905	
<b>5.02.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>265.000.000</b>	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	265.000.000	
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>771.992.200</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.498.000	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	492.867.700	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.000.000	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	46.710.500	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.916.000	
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.340.000</b>	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	146.340.000	
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>705.240.000</b>	
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	263.200.000	
5.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	17.760.000	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.090.000	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	361.000.000	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>25.193.559.966</b>	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1.464.089.770</b>	
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	306.834.000	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	245.960.000	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	98.311.000	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	71.915.000	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	311.269.970	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	306.799.800	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	123.000.000	
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>792.311.016</b>	
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	84.928.500	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	63.999.800	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	151.515.608	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	81.071.400	
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	65.000.000	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	77.820.100	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	267.975.608	
<b>5.02.02.2.03</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>1.412.159.180</b>	
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	93.503.800	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	123.896.340	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	21.666.200	
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	655.836.800	
5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	31.067.400	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	35.100.000	
5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	13.915.500	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	21.874.400	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.365.600	
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	298.421.240	
5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	75.511.900	
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>21.280.000.000</b>	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	13.780.000.000	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	7.500.000.000	
<b>5.02.02.2.05</b>	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>245.000.000</b>	
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	245.000.000	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.460.404.310</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>5.02.03.2.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.460.404.310</b>	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	145.495.200	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	18.600.000	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	1.354.999.910	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	70.000.000	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	94.998.360	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	259.819.840	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	131.942.900	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	384.548.100	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.830.246.394</b>	
<b>5.02.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>1.830.246.394</b>	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	102.869.000	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	51.749.100	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	74.914.400	
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.716.644	
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	229.846.366	
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	223.749.800	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	170.649.640	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	689.569.444	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	179.182.000	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>6.792.074.076</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.792.074.076</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>6.792.074.076</b>	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4.417.131.706</b>	
<b>5.03.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.618.400</b>	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.618.400	
<b>5.03.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.968.988.366</b>	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.968.988.366	
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>51.322.800</b>	
5.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	36.377.800	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	14.945.000	
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>156.586.400</b>	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	972.100	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.943.400	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.656.100	
5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.995.800	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.019.000	
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.870.000</b>	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.080.000	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.350.000	
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.440.000	
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>194.745.740</b>	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.158.170	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.500.000	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.520.000	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.567.570	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.374.942.370</b>	
<b>5.03.02.2.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>784.346.400</b>	
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	43.748.000	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	292.610.700	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	37.209.300	
5.03.02.2.01.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	186.802.300	
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	223.976.100	
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>477.122.700</b>	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	94.329.100	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	54.137.300	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	328.656.300	
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>933.656.200</b>	
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	607.731.300	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	291.407.200	
5.03.02.2.03.14	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	34.517.700	
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>179.817.070</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.744.900	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	26.547.400	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.793.600	
5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	23.664.600	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	41.405.770	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	10.249.700	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	28.411.100	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>917.272.470</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>917.272.470</b>	
<b>5.03.5.04.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>	<b>917.272.470</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>917.272.470</b>	
<b>5.04.02.2.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>917.272.470</b>	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	917.272.470	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.060.490.700</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.060.490.700</b>	
<b>5.01.5.05.0.00.01.0000</b>	<b>Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>1.060.490.700</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>1.060.490.700</b>	
<b>5.05.02.2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>139.523.800</b>	
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	139.523.800	
<b>5.05.02.2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>143.822.000</b>	
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	143.822.000	
<b>5.05.02.2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>601.357.400</b>	
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	483.411.200	
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	117.946.200	
<b>5.05.02.2.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>175.787.500</b>	
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	175.787.500	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>8.068.775.343</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>8.068.775.343</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>8.068.775.343</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.656.405.373</b>	
<b>6.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.413.526.003</b>	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.413.526.003	
<b>6.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>455.744.800</b>	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	402.035.000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.709.800	
<b>6.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>285.475.100</b>	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.494.100	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.312.800	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.260.800	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.557.400	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.000.000	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.850.000	
<b>6.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.711.900</b>	
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.711.900	
<b>6.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36.685.000</b>	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.465.000	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.220.000	
<b>6.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>364.262.570</b>	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.158.170	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.950.000	
6.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.000.000	
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.380.000	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.774.400	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>924.571.170</b>	
<b>6.01.02.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>751.765.170</b>	
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199.022.970	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	237.651.000	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	33.884.500	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	73.640.800	
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	136.126.500	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	71.439.400	
<b>6.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>172.806.000</b>	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	67.820.100	
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	104.985.900	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>487.798.800</b>	
<b>6.01.03.2.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>487.798.800</b>	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	246.158.600	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	76.177.800	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	76.706.400	
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	88.756.000	
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>71.983.438.797</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Mandiangin Koto Selayan</b>	<b>24.822.780.210</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>Kecamatan Mandiangin Koto Selayan</b>	<b>15.275.276.178</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.088.920.857</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>17.268.400</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.268.400	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.662.110.573</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.662.110.573	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.850.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>146.652.100</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.759.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.406.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.837.800	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.992.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	101.656.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>40.710.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.110.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.600.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>178.329.784</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.950.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.200.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.179.784	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>553.483.521</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>458.883.700</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	221.184.800	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	237.698.900	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>94.599.821</b>	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	94.599.821	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>531.299.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	30.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>501.299.800</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	501.299.800	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>101.572.000</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>101.572.000</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	101.572.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>Kelurahan Koto Salayan</b>	<b>789.620.390</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>165.449.120</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.334.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.179.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.499.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.929.300	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.226.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.339.800</b>	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.889.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>145.775.320</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.830.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.959.070	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>340.033.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>340.033.800</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	340.033.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>284.137.470</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>35.302.670</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.100.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.202.670	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>248.834.800</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	248.834.800	
<b>7.01.0.00.0.00.01.02</b>	<b>Kelurahan Campago Ipuh</b>	<b>1.480.103.428</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>173.112.570</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>18.871.400</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	912.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.698.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.186.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.574.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.280.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	680.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>146.961.170</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.550.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.120.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.331.170	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>742.429.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>742.429.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	742.429.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>564.561.858</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>104.962.058</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.689.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	96.272.558	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>459.599.800</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	459.599.800	
<b>7.01.0.00.0.00.01.03</b>	<b>Kelurahan Manggis Ganting</b>	<b>933.190.818</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>212.504.920</b>	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.850.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.252.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	683.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.798.700	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.740.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.499.900	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.210.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.595.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	245.200	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.595.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	754.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>129.807.020</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.876.250	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.998.700	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.932.070	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>464.721.028</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>464.721.028</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	464.721.028	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>255.964.870</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>38.455.670</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.992.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	29.463.670	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>217.509.200</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	217.509.200	
<b>7.01.0.00.0.00.01.04</b>	<b>Kelurahan Pulau Anak Air</b>	<b>1.365.297.458</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>366.872.254</b>	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.850.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>17.766.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	925.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.309.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.409.900	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.802.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.440.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294.815.754</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	244.829.504	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>561.373.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>561.373.800</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	561.373.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>437.051.404</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>82.967.104</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.737.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	73.229.604	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>354.084.300</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	354.084.300	
<b>7.01.0.00.0.00.01.05</b>	<b>Kelurahan Puhun Pintu Kabun</b>	<b>1.201.967.590</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>125.547.820</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.228.300</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	835.700	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.056.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.498.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.518.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.710.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	710.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90.609.520</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.960.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.450.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.173.270	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>741.474.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>741.474.100</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	741.474.100	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>334.945.670</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>42.569.070</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.701.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	32.867.470	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>292.376.600</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	292.376.600	
<b>7.01.0.00.0.00.01.06</b>	<b>Kelurahan Puhun Tembok</b>	<b>711.286.808</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>177.391.270</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.723.800</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.848.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.412.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.859.300	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.103.500	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.820.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.900.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.330.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>140.847.470</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.988.000	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.839.200	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.460.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.560.270	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>47.500.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>47.500.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.500.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>486.395.538</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>107.710.038</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.281.200	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	98.428.838	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>378.685.500</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	378.685.500	
<b>7.01.0.00.0.00.01.07</b>	<b>Kelurahan Kubu Gulai Bancah</b>	<b>932.806.490</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>131.921.120</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>18.262.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	713.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.575.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.953.600	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.499.800	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.200.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.310.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.560.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.348.920</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.240.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.610.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.472.670	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>467.449.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>467.449.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	467.449.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>333.435.470</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>37.435.870</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.570.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	27.865.370	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>295.999.600</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	295.999.600	
<b>7.01.0.00.0.00.01.08</b>	<b>Kelurahan Campago Guguk Bulek</b>	<b>1.395.799.560</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>193.336.570</b>	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>43.850.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	43.850.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>15.704.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.224.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.460.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.040.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.660.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.490.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.800.000	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.420.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>121.291.870</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.352.500	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.400.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.590.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.949.370	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>529.009.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>529.009.800</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	529.009.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>673.453.190</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>109.615.190</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.819.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.795.390	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>563.838.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	563.838.000	
<b>7.01.0.00.0.00.01.09</b>	<b>Kelurahan Garegeh</b>	<b>737.431.490</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>113.792.320</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>14.210.300</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.025.300	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.852.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.056.100	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.956.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.340.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.040.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.242.020</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.080.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.835.770	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>386.203.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>386.203.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	386.203.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>237.435.270</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>67.439.470</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.411.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	58.027.670	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>169.995.800</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	169.995.800	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Guguk Panjang</b>	<b>24.861.523.505</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>Kecamatan Guguk Panjang</b>	<b>16.779.982.901</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>15.237.460.647</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>23.257.700</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.257.700	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.830.697.847</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.830.697.847	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>145.000.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	145.000.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>254.644.600</b>	
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	254.644.600	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>169.080.600</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.583.500	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.256.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.018.900	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.992.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	127.230.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.561.044.100</b>	
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	202.800.000	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.358.244.100	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>36.980.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.980.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>216.755.800</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.100.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.022.800	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.633.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>598.428.810</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>354.518.640</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.710.100	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.808.540	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>243.910.170</b>	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	243.910.170	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>898.837.244</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>143.031.000</b>	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	143.031.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>755.806.244</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	748.581.144	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	7.225.100	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>45.256.200</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>45.256.200</b>	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45.256.200	
<b>7.01.0.00.0.00.02.01</b>	<b>Kelurahan Kayu Kubu</b>	<b>1.165.910.094</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>115.657.800</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>20.488.500</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.595.900	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.584.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.948.500	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.480.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.880.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>26.100.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	760.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.340.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.069.300</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.105.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.124.300	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>319.799.600</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>319.799.600</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	319.799.600	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>730.452.694</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>468.042.594</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.799.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	459.242.794	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>262.410.100</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	262.410.100	
<b>7.01.0.00.0.00.02.02</b>	<b>Kelurahan Pakan Kurai</b>	<b>1.166.328.704</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>124.292.600</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.318.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.454.600	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.359.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.785.000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.400.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>14.880.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.280.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.093.900</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.680.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	58.863.900	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>228.538.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>228.538.100</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	228.538.100	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>813.498.004</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>400.205.904</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.923.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	392.282.004	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>413.292.100</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	413.292.100	
<b>7.01.0.00.0.00.02.03</b>	<b>Kelurahan Benteng Pasar Atas</b>	<b>749.159.314</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>83.667.404</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>16.723.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	405.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.429.100	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.269.800	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.300.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.160.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	460.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.700.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>54.783.504</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.313.504	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>338.106.100</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>338.106.100</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	338.106.100	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>327.385.810</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>148.632.210</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.800.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	140.832.210	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>178.753.600</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	178.753.600	
<b>7.01.0.00.0.00.02.04</b>	<b>Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang</b>	<b>1.001.507.436</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>113.979.970</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>26.095.800</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.174.800	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.757.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.209.200	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.634.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>9.320.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.820.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>78.564.170</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.150.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.864.170	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>290.709.500</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>290.709.500</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	290.709.500	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>596.817.966</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>365.908.066</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.543.500	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	358.364.566	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>230.909.900</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	230.909.900	
<b>7.01.0.00.0.00.02.05</b>	<b>Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah</b>	<b>1.124.189.650</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>140.661.020</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>21.737.200</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	654.100	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.722.800	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.540.300	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.500.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12.230.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	590.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.640.000	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>106.693.820</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.026.250	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.973.900	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.693.670	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>340.362.700</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>340.362.700</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	340.362.700	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>643.165.930</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>192.195.330</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	11.180.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	181.014.430	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>450.970.600</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	450.970.600	
<b>7.01.0.00.0.00.02.06</b>	<b>Kelurahan Tarok Dipo</b>	<b>1.840.893.626</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>108.007.770</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>39.759.700</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	553.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.867.300	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.319.400	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.700.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.760.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.488.070</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.420.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.518.070	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>669.414.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>669.414.800</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	669.414.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>1.063.471.056</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>115.342.656</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.497.600	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	105.845.056	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>948.128.400</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	948.128.400	
<b>7.01.0.00.0.00.02.07</b>	<b>Kelurahan Bukit Apit Puhun</b>	<b>1.033.551.780</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>116.970.970</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>25.533.900</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.996.000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.169.200	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.002.700	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.320.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.046.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.390.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	390.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.047.070</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.550.000	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.577.070	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>360.051.700</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>360.051.700</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	360.051.700	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>556.529.110</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>203.229.240</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.357.900	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	194.871.340	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>353.299.870</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	353.299.870	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh</b>	<b>22.299.135.082</b>	
<b>7.01.0.00.0.00.03.0000</b>	<b>Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh</b>	<b>15.001.934.340</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>14.392.168.931</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>51.815.566</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.815.566	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.961.086.365</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.961.086.365	
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>201.050.000</b>	
7.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	201.050.000	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>146.668.550</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.622.400	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.442.900	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.646.250	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.300.000	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.992.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.665.000	
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.500.000.000</b>	
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.500.000.000	
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>152.000.000</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>379.548.450</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.396.950	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.950.000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.201.500	



**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Usuran Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>323.918.565</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>250.749.900</b>	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.750.000	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	221.999.900	
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>73.168.665</b>	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	73.168.665	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>214.539.704</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>30.000.000</b>	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	30.000.000	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>184.539.704</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	184.539.704	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>71.307.140</b>	
<b>7.01.04.7.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>71.307.140</b>	
7.01.04.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	71.307.140	
<b>7.01.0.00.0.00.03.01</b>	<b>Kelurahan Belakang Balok</b>	<b>1.005.734.340</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>68.785.170</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>21.045.000</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.020.500	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.064.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.960.000	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>47.740.170</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.740.170	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>440.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>440.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	440.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>496.949.170</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>216.149.270</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8.999.800	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	207.149.470	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>280.799.900</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	280.799.900	
<b>7.01.0.00.0.00.03.02</b>	<b>Kelurahan Birugo</b>	<b>911.755.762</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>74.751.166</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.709.800</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.063.000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>52.041.366</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.041.366	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>276.999.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>276.999.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	276.999.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>560.004.696</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>214.154.696</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	205.154.696	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>345.850.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	345.850.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.03</b>	<b>Kelurahan Aur Kuning</b>	<b>1.447.438.638</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>77.819.468</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.711.550</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.064.750	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.107.918</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	55.107.918	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>857.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>857.000.000</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	857.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>512.619.170</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>211.944.170</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	202.944.170	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>300.675.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	300.675.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.04</b>	<b>Kelurahan Sapiran</b>	<b>527.830.016</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>71.993.916</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.051.550</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.404.750	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>48.942.366</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.942.366	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>46.999.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>46.999.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	46.999.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>408.836.200</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>180.211.400</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.211.400	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>228.624.800</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	228.624.800	
<b>7.01.0.00.0.00.03.05</b>	<b>Kelurahan Kubu Tanjung</b>	<b>804.735.050</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>73.842.550</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.711.550</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.064.750	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.131.000</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.131.000	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>391.999.900</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>391.999.900</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	391.999.900	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>338.892.600</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>180.482.700</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.017.100	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.465.600	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>158.409.900</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	158.409.900	
<b>7.01.0.00.0.00.03.06</b>	<b>Kelurahan Pakan Labuah</b>	<b>902.144.240</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>78.746.270</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.711.500</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.064.700	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.034.770</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.034.770	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>296.999.200</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>296.999.200</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	296.999.200	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>526.398.770</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>242.998.770</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	233.998.770	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>283.400.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	283.400.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.07</b>	<b>Kelurahan Ladang Cakiah</b>	<b>763.285.676</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>67.654.046</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.710.300</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.063.500	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>44.943.746</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.943.746	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>361.999.800</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>361.999.800</b>	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	361.999.800	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>333.631.830</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>180.031.830</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.031.830	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>153.600.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	153.600.000	
<b>7.01.0.00.0.00.03.08</b>	<b>Kelurahan Parit Antang</b>	<b>934.277.020</b>	
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>72.588.220</b>	
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>22.711.550</b>	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.676.000	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.064.750	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.970.800	
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>49.876.670</b>	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.876.670	
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>427.000.000</b>	
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>427.000.000</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	427.000.000	
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>434.688.800</b>	
<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>180.188.800</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	171.188.800	
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>254.500.000</b>	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	254.500.000	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>13.341.356.817</b>	
<b>8.01.1.05.0.00.04.0000</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>13.341.356.817</b>	
<b>8.01.1.05.0.00.04.0000</b>	<b>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	<b>13.341.356.817</b>	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.097.465.024</b>	
<b>8.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.157.900</b>	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.157.900	
<b>8.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.820.837.427</b>	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.820.837.427	
<b>8.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.850.700</b>	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	781.000	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.593.000	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.933.000	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.700	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.544.000	
<b>8.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>30.970.000</b>	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	970.000	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	
<b>8.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>97.648.997</b>	
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.649.999	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.999.998	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.999.000	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>257.772.400</b>	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
<b>8.01.02.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>257.772.400</b>	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	219.999.800	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	37.772.600	
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>7.822.050.323</b>	
<b>8.01.03.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>7.822.050.323</b>	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	6.417.105.700	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.404.944.623	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>545.976.300</b>	
<b>8.01.04.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>545.976.300</b>	
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	529.220.800	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.755.500	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>631.349.000</b>	
<b>8.01.05.2.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>631.349.000</b>	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57.813.700	
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	573.535.300	

**Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan		Plafon Anggaran Sementara	Ket
1	2	3	4
8.01.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>1.986.743.770</b>	
8.01.06.2.01	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>1.986.743.770</b>	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	581.037.370	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.405.706.400	



**4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer**

Berdasarkan struktur belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka lebih lanjut plafon anggaran sementara terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga. Struktur dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal,**  
**Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer**

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	Belanja Operasi	<b>746.226.097.498,00</b>
a	Belanja Pegawai	345.396.955.984,00
b	Belanja Barang dan Jasa	347.197.065.086,00
c	Belanja Subsidi	4.101.068.884,00
d	Belanja Hibah	43.289.507.544,00
e	Belanja Bantuan Sosial	6.241.500.000,00
2	Belanja Modal	<b>146.059.455.851,00</b>
a	Belanja Modal Tanah	202.800.000,00
b	Belanja Peralatan dan Mesin	21.658.123.507,00
c	Belanja Gedung dan Bangunan	94.080.545.444,00
d	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.988.956.900,00
e	Belanja Aset Tetap Lainnya	129.030.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00,00
4	Belanja Transfer	10.533.720.000,00,00

## **BAB V**

### **RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan Daerah berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);  
Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan Pendapatan Transfer, pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan, Sisa Belanja Lainnya dan Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD.
2. Pencairan Dana Cadangan;  
Digunakan untuk mencatat pencairan Dana Cadangan sesuai dengan Perda terkait Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;  
Digunakan untuk mencatat Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat;  
Digunakan untuk mencatat penerimaan pinjaman daerah berupa Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain, Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB), Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Pinjaman Daerah dari Masyarakat.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau  
Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat, dan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD.

- 
6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD dan Divestasi BLUD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk pembiayaan:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

2. Penyertaan Modal Daerah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMN dan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Penyertaan Modal yang dilakukan adalah telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah terlebih dahulu terhadap masing-masing perusahaan tempat penyertaan modal.

3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Digunakan untuk Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat, Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek, Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, pemberian pinjaman daerah kepada BUMD, pemberian pinjaman daerah kepada BUMN, pemberian pinjaman daerah kepada koperasi, pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, serta Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD.

5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberian Pinjaman melalui BLUD dan Investasi BLUD

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

### 5.1. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah hanya dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), SiLPA diperhitungkan secara rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan anggaran kegiatan yang direncanakan tahun 2023 yang merupakan prioritas

## PPAS 2023

dalam pencapaian visi dan misi pimpinan daerah dan pengeluaran rutin lainnya. Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp43.000.000.000,00 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (tahun 2022).

### 5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2023, Kota Bukittinggi akan menganggarkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.0,00.

Sehingga, rencana Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun 2023 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1**  
**Kebijakan Pembiayaan Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023**

No	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
<b>1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>43.000.000.000.00</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.000.000.000.00
1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00
<b>2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0.00</b>
2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	0.00
2.2	Penyertaan modal daerah	0.00
2.3	Pembentukan dana cadangan	0.00
2.4	Pemberian pinjaman daerah	0.00
2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya	0.00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>43.000.000.000.00</b>

Dari rencana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dilakukan dihasilkan pembiayaan daerah netto adalah sebesar (Rp43.000.000.000,00).

**BAB VI  
PENUTUP**

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023 berdasarkan pada asumsi-asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2023. Apabila ada kebijakan dari Pemerintah terkait dengan alokasi pendapatan dana transfer, maka alokasi dimaksud langsung disesuaikan dengan kebijakan tersebut tanpa mengubah PPAS.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Bukittinggi, 15 Agustus 2022

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. ERMAN SAFAR, SH**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BUKITTINGGI**

selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**BENY YUSRIAL, S.IP**  
KETUA



**NUR HASRA, B.Sc**  
WAKIL KETUA



**RUSDY NURMAN, SH**  
WAKIL KETUA